

**Mengungkap Meningkatnya Partisipasi Pemilih dan Pemaknaan**

**Calon Tunggal di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020**

**SKRIPSI**

**Program Studi S-1 Ilmu Politik**



**Disusun Oleh :**

**Ratnasari Peri**

**NIM : 1806016011**

**ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**



**SKRIPSI**

**Mengungkap Meningkatnya Partisipasi Pemilih dan Penaknaan**

**Calon Tunggal di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020**

Disusun oleh

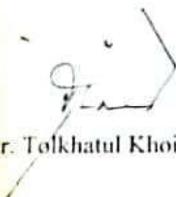
**Ratnasari Peri**

1806016011

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 24 Juni 2022  
dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



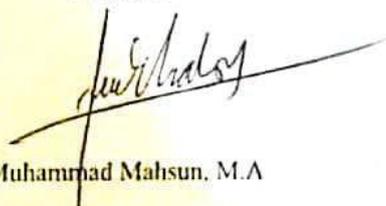
Dr. Tolkhatul Khoir, M.A

Sekretaris



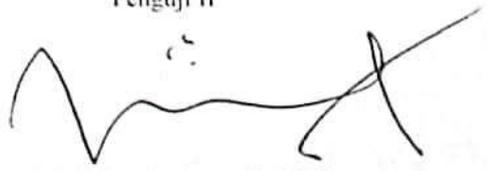
Drs. H. Nur Syamsudin, M.A

Penguji I



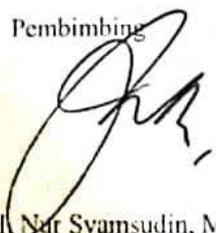
Muhammad Mahsun, M.A

Penguji II



Moh. Yamin Darsyah, M.Si

Pembimbing



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ratnasari Peri  
NIM : 1806016011  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Mengungkap Meningkatnya Partisipasi Pemilih dan Pemaknaan Calon  
Tunggal di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Agustus 2022

Pembimbing



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A  
NIP. 196805051995031002

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya Ratnasari Peri menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul *“Mengungkap Meningkatnya Partisipasi Pemilih dan Pemaknaan Calon Tunggal di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020”* merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Sumber-sumber lain yang menjadi referensi dan rujukan di dalam penulisan skripsi ini saya sertakan untuk menjadi koreksi kemudian. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan Terima Kasih.

Semarang. 8 Agustus 2022

Yang menyatakan



Ratnasari Peri

NIM 1806016011

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Mengungkap Meningkatnya Partisipasi Pemilih dan Pemaknaan Calon Tunggal di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020”**.

Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada pimpinan umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi yang berakhlakul karimah, berpengetahuan dan berintelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rector UIN Walisongo Semarang dan seluruh jajarannya.
2. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag dan Muhammad Mahsun, M. A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.

4. Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M. Ag., selaku Wali Dosen atas segala ilmu, arahan, dan juga dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, cepat dan terukur.
5. Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag selaku Dosen Pemimbing yang telah sabar dan tulus dalam memberi masukan maupun arahan, menuntun, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
7. Teristimewa kedua orang tua penulis Mokh. Hidayat, SH.MH., dan Evi Herlina yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, do'a, kesabaran, semangat, nasihat, motivasi pengorbanan baik dari segi moril maupun material kepada penulis yang tiada henti dan tiada lelah sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Kedua kakak penulis Apt. Ratu Komala, S.Farm., dan Alm. Indra Bima Furqaan terima kasih atas do'a dan dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Yang penulis kasihi, Isnaen Rachmat Al-Hafidz yang selalu memberikan dukungan, bantuan, perhatian, cinta dan kasih sayang kepada penulis serta menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini agar dapat lulus tepat waktu. Terima kasih untuk selalu ada dan selalu bersedia meluangkan waktu, pikiran untuk mendengarkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga urusan kita diperlancar.
10. Sahabat penulis, Alma Rafiftyas Putri yang telah mewarnai perjalanan kuliah penulis selama 4 tahun menempuh pendidikan. Terima kasih untuk selalu sabar mendengarkan keluh kesah, menemani dalam setiap kesulitan, memberikan motivasi yang tiada henti, serta mengajarkan arti persahabatan yang tak ternilai kepada penulis.

11. Penghuni Kost 44 angkatan 2018 khususnya, Antung, Widya, Virda, Nisa, Cika, Lara, Mella yang telah menghidupkan suasana kostan sehingga penulis tidak pernah merasa kesepian selama berada di kostan yang jauh dari orang tua. Setiap canda dan tawa yang terjadi di kost 44 akan selalu penulis kenang selamanya.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, khususnya Ilmu Politik A 2018. Senang bertemu dan kenal dengan kalian, semoga kalian sukses dijalanannya masing-masing.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun material yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Atas do'a, bantuan, dan semangat yang berharga. Penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kepada kalian. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mempunyai nilai yang berguna bagi pembacanya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 8 Agustus 2022

Penulis



Ratnasari Peri

NIM 1806016011

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirohim*

Karya ini saya persembahkan untuk orang terkasih  
Bapak Mokh. Hidayat, SH.MH., dan Ibu Evi Herlina yang sudah  
membesarkan dan memberi kasih sayang untuk putri bungsunya

Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

## **MOTTO**

*“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba diluar batas kemampuannya.  
Setiap ujian yang diberikan merupakan tahapan dalam kehidupan untuk  
membuat seorang hamba menjadi lebih bersyukur”*

(QS. Al-Baqarah: 286)

## **ABSTRAK**

Fenomena calon tunggal pada pilkada di Kota Semarang tahun 2020 merupakan fenomena baru yang terjadi selama pagelaran pilkada langsung di Kota Semarang. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami bencana non-alam covid-19 yang memberikan dampak terhadap semua sector termasuk sector politik yang dimana pelaksanaan pilkada tahun 2020 dilaksanakan di tengah situasi darurat dari adanya covid-19. Dua fenomena besar ini menjadi permasalahan baru bagi masyarakat Kota Semarang.

Dalam penelitian ini membahas bagaimana KPU Kota Semarang dan Tim Sukses pasangan calon serta kontribusi Kesbangpol Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, serta bagaimana sikap dan respon masyarakat kelas menengah di perumahan pondok ngaliyan asri dalam memaknai fenomena calon tunggal yang terjadi pada pilkada tahun 2020 di Kota Semarang. Data lapangan diperoleh dengan melakukan riset observasi lapangan, wawancara, dokumentasi dan juga menggunakan studi literatur dari catatan-catatan terkait. Kemudian analisis data digunakan untuk menggambarkan fenomena dari data yang didapatkan di lapangan dan dikaitkan menggunakan teori politik yang relevan yakni teori electoral dan teori pilihan rasional.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kota Semarang gencar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dua metode sosialisasi yakni sosialisasi yang dilakukan secara konvensional dan daring. Sedangkan Tim Sukses PDIP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui konsolidasi dan koordinasi yang baik diantara lingkup internal maupun eksternal. Lalu pihak Kesbangpol Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melakukan dua kegiatan yaitu verifikasi bantuan parpol dan sosialisasi pendidikan politik. Sementara masyarakat kelas menengah di perumahan pondok ngaliyan asri dalam memaknai calon tunggal terbagi menjadi dua sikap dan respon, yaitu pihak pro atau tidak mempermasalahkan adanya calon tunggal dan terdapat juga pihak kontra yang menolak keras adanya calon tunggal yang dikhawatirkan akan mereduksi demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: calon tunggal, pilkada, pilihan rasional, sikap, partisipasi

## **ABSTRACT**

The phenomenon of a single candidate in the regional elections in Semarang City in 2020 is a new phenomenon that occurred during the direct regional election in Semarang City. In 2020 Indonesia experienced a non-natural disaster of covid-19 which had an impact on all sectors including the political sector where the implementation of the 2020 elections was carried out in the midst of an emergency situation from the presence of covid-19. These two major phenomena have become new problems for the people of Semarang City.

This study discusses how the Semarang City KPU and the Success Team for candidate pairs and the contribution of the Semarang City Kesbangpol in increasing public participation, as well as how the attitudes and responses of the middleclass community in the Ngaliyan Asri housing estate in interpreting the single candidate phenomenon that occurred in the 2020 Pilkada in Semarang City. Field data were obtained by conducting field observation research, interviews, documentation and also using literature studies from related notes. Then data analysis is used to describe the phenomenon from the data obtained in the field and associated using relevant political theories, namely electoral theory and rational choice theory.

The results of this study indicate that the Semarang City KPU is aggressively increasing public participation through two methods of socialization, namely conventional and online socialization. While the PDIP Success Team in increasing community participation through good consolidation and coordination between internal and external scopes. Then the Kesbangpol Semarang City in increasing public participation carried out two activities, namely verification of political party assistance and socialization of political education. Meanwhile, the middleclass community in Pondok Ngaliyan Asri housing in interpreting a single candidate is divided into two attitudes and responses, namely those who are pro or not concerned about the existence of a single candidate and there are also contra who strongly reject the existence of a single candidate who is feared to reduce democracy in Indonesia.

Keywords: single candidate, pilkada, rational choice, attitude, participation

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB	
I .....	1
.....	1
PENDAHULUAN .....	1
.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II .....	17
KERANGKA TEORI : DEMOKRASI ELEKTORAL DAN PILIHAN	
RASIONAL .....	17
A. Demokrasi Elektoral .....	17
B. Pilihan Rasional (Rational Choice) .....	21
BAB III .....	39
DESKRIPSI LOKASI KOTA SEMARANG .....	
A. Gambaran Umum Kota Semarang .....	39

B. Letak dan Keadaan Wilayah .....	40
C. Kondisi Sosial Budaya di Kota Semarang .....	41
D. Kondisi Perekonomian di Kota Semarang .....	43
E. Kondisi Politik di Kota Semarang.....	45
F. Gambaran Khusus Calon Tunggal di Kota Semarang .....	47
BAB IV .....	51
FAKTOR PENGARUH TINGGINYA ANGKA PARTISIPASI PEMILIH DI PILKADA KOTA SEMARANG TAHUN 2020.....	51
A. Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.....	55
1. Sosialisasi Secara Konvensional (Luring) .....	57
2. Sosialisasi Secara Tidak Langsung (Virtual) .....	59
B. Peran Tim Sukses dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat .....	65
1. Konsolidasi dan Koordinasi Yang Baik .....	66
2. Track Record .....	70
3. Hambatan Tim Sukses ditengah Pandemi Covid-19.....	72
C. Peran Kesbangpol Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat .....	74
1. Verifikasi Bantuan Parpol .....	75
2. Sosialisasi Pendidikan Politik .....	76
BAB V.....	77
SIKAP DAN RESPON MASYARAKAT MEMAKNAI CALON TUNGGAL...77	
A. Fenomena Calon Tunggal dan Pemaknaannya .....	85
Oleh Masyarakat Kelas Menengah .....	85
1. Sikap Masyarakat Kelas Menengah Terhadap Pelaksanaan Pilkada dengan Pasangan Calon Tunggal.....	85
2. Melakukan Perhitungan Dari Pemanfaatan Atau Preferensi dalam Pemilihan Sebagai Suatu Bentuk Tindakan .....	89
C. Harapan Masyarakat Untuk Pilkada Kota Semarang.....	93
BAB VI .....	97

PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	95
CURRICULUM VITAE .....	104

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa) di Kota Semarang Tahun 2020.....	42
Tabel 2 PDRB Per Kapita Kota Semarang Tahun 2017-2019.....	44
Tabel 3 Daerah Pilihan Pemilu Anggota DPRD Kota Semarang .....	45
Tabel 4 Perolehan Tiap Kursi Partai Politik Pada Pileg Kota Semarang Tahun 2019.....	46
Tabel 5 Jumlah Kandidat Pilkada Langsung di Kota Semarang .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kota Semarang.....	39
Gambar 2 Perumahan Pondok Ngaliyan Asri .....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara luas demokrasi merupakan model sistem politik yang mengakomodisir kedaulatan rakyat terwujud. Mengacu pada nama asalnya dari bahasa Yunani, demokrasi terdiri *demos* berarti rakyat serta *kratos* artinya pemerintah. Konteks ini secara tidak langsung mendefinisikan bahwa posisi rakyat ialah pemilik kedaulatan akan jalannya pemerintah. Josiah Ober ilmuwan politik menjabarkan bahwasanya saat zaman Yunani demokrasi bermakna *power* atau kekuasaan milik rakyat. Menpunyai power atau kekuatan artinya punya performa untuk melaksanakan sesuatu. Ober mengemukakan sesuai teks asli yang berarti demokrasi harus mengacu pada kekuasaan dalam artian performa segala sesuatunya dikerjakan (Ober, 2007). Pemilu lazim dipakai bagi negara penganut demokrasi.

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan politik dengan pemilu sebagai praktis dan lembaga politiknya untuk membentuk suatu perwakilan pemerintahan, pemilu juga menjadi unsur vital dan menjadi parameter pengukuran kedemokratisan negara dengan pelaksanaan pemilihan umum negara tersebut (Kansil, 1986). Pemilu ialah jembatan pembentukan pemerintahan yang demokratis dengan rakyat sebagai penentu pemilihan pemimpin serta wakilnya yang akan mengatur masa depan bangsanya. Pemilu juga menjadi penghubung suprastruktur dan infrastruktur politik yang menyebabkan terbentuknya pemerintahan dari oleh serta untuk rakyat.

Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi serta menggunakan mekanisme pemilu untuk memperoleh kekuasaan. Terdapat dua pemilihan umumnya di Indonesia. Pertama, pelaksanaan pemilu dalam pemilihan presiden juga wakilnya, DPR, DPD, serta DPRD provinsi serta kabupaten/kota yang dikerjakan semenjak tahun 1955 serta rutin dilakukan setiap sekali dalam 5 tahun. Kedua, pemilihan gubernur, bupati, walikota dan para wakilnya dimulai

sejak tahun 2005 yang ditandai sebagai awal reformasi akhirnya seluruh kepala daerah wajib dipilih langsung.

Pertama kali diselenggarakan pemilihan umum kepala daerah sesuai UU No 32 Tahun 2004 ialah tahun 2005 dimana sebelumnya pemilihannya dipilih langsung dari DPRD. Adanya UU No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, menjelaskan bahwa pilkada termasuk dari pemilu yang disebut pilkuda menyangkut pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai prinsip negara demokrasi dengan demokrasi tingkat lokal sudah tercapai tujuan dasar yang bebas, demokratis, tanpa kekerasan dan adil. Digelarnya pilkada secara langsung dan serentak merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendorong proses demokratisasi di tingkat local. Namun realitanya politik baru yang jarang terjadi di negara lain dalam pelaksanaan pilkada serentak yaitu kontestasi politik calon tunggal melawan kotak kosong dipandang sebagai anomaly demokrasi (Riyanto, 2021). Pilkada pasangan calon tunggal serentak telah muncul sejak tahun 2015 dengan tiga calon tunggal dan mengalami kenaikan setiap waktunya seperti pilkada 2017 dengan sembilan calon tunggal. Pada pilkada 2018 bertambah lagi menjadi 16 calon tunggal, dan mengalami puncak peningkatan pada pilkada serentak tahun 2020 mencapai dua puluh lima calon tunggal.

Pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 digelar secara serentak pada 224 kabupaten, 37 kota serta 9 provinsi di seluruh Indonesia yang diketahui dari Beritasatu.com untuk merebutkan 270 posisi kepala daerah terdapat 486 pasangan calon. KPU RI mengemukakan dari data pilkada ini ada 25 daerah dengan calon tunggal seperti Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Semarang, Kota Pematangsiantar, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bengkulu Utara, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kebumen, Kediri, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Badung, Kabupaten Ngawi, Kota Balikpapan, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Gowa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Soppeng,

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan,.

Peristiwa calon tunggal pada pilkada Kota Semarang 2020 merupakan *incumbent* yang diartikan Salomo Simanungkalit berkaitan erat dengan kata petahana dan konteks politik sebagai *the holder of a political life* untuk merujuk kandidat dari partai kandidat yang sedang memegang kedudukan kekuasaan (Raquhel Dominique Ning; Tedi Ervianto; Muhammad Ali Azhar, 2016). Hal ini disebabkan pasangan calon Hendi-Ita sebagai calon walikota juga wakil walikota Kota Semarang tidak terdapat lawan sehingga hanya melawan kotak kosong ketika berlangsungnya pilkada. Peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya pada pilkada di Kota Semarang, dan oleh sebab itu pilkada tahun 2020 di Kota Semarang adalah pilkada pertama terjadinya fenomena calon tunggal.

Dari peristiwa pilkada Kota Semarang tahun 2020 diketahui belum bisa dikatakan sebagai pilkada yang demokratis dan aspiratif, karena pilkada Kota Semarang Tahun 2020 masih belum kompetitif dikarenakan Hendi sebagai calon tanpa lawan kompetitor dalam pilkada Semarang 2020 dan menjadi satu-satunya calon walikota Kota Semarang. Sedangkan dalam demokrasi yang hidup, pemilihan kepala daerah harus demokratis yaitu terdapat kontestasi yang substansial yaitu ketika rakyat memperoleh jaminan dalam mewujudkan kedaulatan mereka melalui hak dipilih dan hak memilih (Angin, 2017).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis peristiwa demokrasi politik dengan calon tunggal pada pilkada serentak tahun 2020 maupun pilkada tahun-tahun sebelumnya bukan hal yang tidak mungkin dilaksanakan. Asumsi dasar demokrasi pada perkembangan praktiknya selalu menjadi hal yang didebatkan dengan partisipasi pemilihlah yang menjadi kunci utama pelaksanaan demokrasinya. Walaupun hanya satu pasangan calon proses pemungutan suara tetap dilakukan karena hak pilih masyarakat keberadaannya dijamin konstitusi.

Kajian fenomena pilkada calon tunggal di Kota Semarang tahun 2020 ini menarik untuk diteliti dikarenakan calon tunggal tersebut memperoleh dukungan seluruh parpol pemilik kursi DPRD Kota Semarang, dari Bisnis.com

pasangan Hendi-Ita didukung 9 parpol berupa 19 kursi PDI Perjuangan; 6 kursi PKS; 6 kursi Partai Demokrat; 6 kursi Partai Gerindra; 4 kursi PKB; 3 kursi Partai Golkar; 2 kursi PSI; 2 kursi Partai Nasdem serta 2 kursi PAN juga 5 parpol nonparlemen seperti Partai Hanura, PKPI, PBB, Partai Berkarya, PPP dan Partai Gelora.

Hal yang tidak kalah menarik lainnya yang ditemukan pada saat berlangsungnya pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang yakni tingginya tingkat partisipasi masyarakat selaku pemilih ketika pilkada tersebut berlangsung yang dilansir dari Kompas.com jumlah partisipasi pemilih dalam pilkada meningkat 68,8% daripada sebelumnya yaitu senilai 65,9% pada tahun 2015. Total pemilih 1.174.068 orang dengan perempuan 604.802 dan laki-laki 569.266 serta TPS berjumlah 3.447 di 177 kelurahan dalam 16 kecamatan, pasangan Hendi-Ita berhasil meraup suara sebanyak 418.490 suara (91,5%), kotak kosong mendapatkan 39.099 suara (8,5%), tidak memilih berjumlah 368.454 suara (31,4%) dan suara tidak sah berjumlah 22.837 (1,9%). Dengan hasil rekapitulasi perhitungan ini, pasangan calon Hendi dan Ita berhasil unggul pada 16 kecamatan.

Adanya peningkatan partisipasi masyarakat pada saat berlangsungnya pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang ini turut menimbulkan tanda tanya mengapa masyarakat menggunakan hak pilihnya pada saat pilkada tersebut meskipun pada pilkada tahun 2020 Indonesia masih gencar-gencarnya dilanda wabah virus corona. Serta pada pemilihan kepala daerah tersebut masyarakat Kota Semarang baru pertama kalinya menghadapi fenomena yang dimana hanya terdapat satu pasangan calon saja pada saat berlangsungnya pilkada di Kota Semarang. Lalu dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat selaku pemilih ini adakah kontribusi yang dilakukan KPU Kota Semarang serta tim sukses dan Kesbangpol Kota Semarang sehingga terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dari tahun sebelumnya. Keseluruhan paparan latar belakang peneliti tertarik menganalisis dari hal-hal apa yang saja dilakukan KPU Kota Semarang serta tim sukses calon kandidat dan Kesbangpol Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta sikap dan respon masyarakat dalam

memaknai adanya calon tunggal ini. Sebab itu peneliti mengangkat tema ini untuk dikaji lebih dalam pada skripsi yang akan peneliti tulis.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa partisipasi masyarakat relative tinggi pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang meskipun diikuti calon tunggal?
2. Bagaimana masyarakat kelas menengah memaknai calon tunggal pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mengapa partisipasi masyarakat relative tinggi pada saat berlangsungnya pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang meskipun saat pilkada tersebut hanya diikuti satu pasangan calon saja.
2. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat kelas menengah memaknai adanya calon tunggal yang terjadi pada saat pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a) Sebagai sumber referensi lebih lanjut pada penelitian mengenai sikap dan respon masyarakat memaknai fenomena calon tunggal pada pemilukada.
  - b) Memberikan kontribusi guna pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu politik.
2. Manfaat Praktis
  - a) Mampu memberi analisis praktis serta pemikiran untuk pemegang kepentingan pada daerah terkait.
  - b) Dapat memberikan pengetahuan baru dalam pengembangan studi mahasiswa FISIP mengenai perkembangan praktik demokrasi.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Partisipasi dalam Fenomena Calon Tunggal

*Pertama*, artikel jurnal oleh Tony Yuri Rahmanto berjudul “*Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten*”. Dalam kajian ini ditemukan bahwa partisipasi masyarakat Banten selaku pemilih mengenai adanya fenomena calon tunggal adalah mereka lebih memilih opsi tidak setuju dikarenakan tidak punya pilihan pasangan calon lain pada saat pemilihan berlangsung sehingga mereka merasa dipaksa untuk memilih satu pasangan calon padahal dalam perspektif hak memilih dan dipilih, partisipasi dan kontestasi merupakan satu kesatuan proses yang harus disediakan oleh negara. Indikator kesuksesan penyelenggaraan sebuah pemilihan adalah dilihat dari adanya partisipasi serta kontestasi. Tanpa ada keduanya maka hanya akan menjadi semu atau sia-sia (Rahmanto, 2018).

*Kedua*, artikel jurnal yang ditulis oleh Kharis Syahrial A.M serta Joko Setiyono dengan judul “*Demokratisasi Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah*”. Dalam penulisan artikel ini menghasilkan sudut pandang penulis mengenai fenomena calon tunggal pilkada serentak tahun 2020 yang terjadi di Kabupaten Boyolali. Dalam kajian ini penulis menekankan bahwa pilkada yang hanya menghadirkan calon tunggal tidak menegasikan tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih. Dari data-data yang ada ditemukan malah terdapat kenaikan partisipasi masyarakat selaku pemilih dari tahun sebelumnya. Factor yang ditemukan adanya peningkatan partisipasi adalah bertambahnya pemilih pemula (Mamonto & Setiyono, 2021).

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rico Febrianto Putro berjudul “*Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tahun 2017 (Studi Terhadap Pelaksanaan dan Tingkat Partisipasi Pemilih di Daerah Jayapura dan Tebing Tinggi)*”. Dalam skripsi ini menunjukkan upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang mana mereka menargetkan partisipasi pemilih mencapai

77,5% namun realitanya hal tersebut belum tercapai. Yang mana partisipasi pemilih di Kota Tebing Tinggi hanya mencapai 55,6% sedangkan di Kota Jayapura hanya 59,6%, keduanya bahkan tidak sampai 60% yang sangat jauh dari apa yang sebelumnya ditargetkan oleh KPU secara nasional. Di dalam kajian ini turut menjelaskan bahwa partisipasi politik di Indonesia kerap dilandasi oleh beberapa pertimbangan sebagai contoh kedekatan social kekerabatan, selain itu mengenai pemahaman politik serta kesadaran masyarakat yang kian membaik sehingga muncul rasionalitas dalam memilih. Hal lain juga karena ketidakpercayaan mereka terhadap calon yang terpilih (Putro, 2018).

*Keempat*, skripsi yang ditulis Versilia Anggraini berjudul “*Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020)*”. Fenomena calon tunggal di Kabupaten Bengkulu Utara ketika pilkada merupakan suatu hal yang baru, karena calon tunggal ini baru pertama kali terjadi ketika pilkada berlangsung. Karena baru pertama kali mengalami calon tunggal pada pemilihan kepala daerah, dinilai hal tersebut yang melatarbelakangi partisipasi masyarakat selaku pemilih menurun. Di dalam skripsi ini juga menjelaskan factor yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara tidak ikut serta dalam pemilihan antara lain yakni factor pendidikan, social serta ekonomi. Kekecewaan mereka karena adanya calon tunggal tidak membuat masyarakat antusias guna mengerjakan pemilihan, mereka seperti dilemma untuk berpartisipasi dalam pemilukada (Anggraini, 2021).

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Achmad Ronggo Prihatmono yang berjudul “*Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Pati Tahun 2017: Suatu Tinjauan Oligarkisme Parpol*”. Dalam kajian ini menggambarkan kekecewaan masyarakat selaku pemilih dengan adanya laporan bahwasanya pasangan calon tunggal melakukan tindakan politik uang

pada saat sebelum berlangsungnya pilkada di Kabupaten Pati. Bahkan dari adanya laporan kecurangan *money politics* tersebut masyarakat membentuk suatu gerakan perlawanan yang mana tidak menginginkan sosok calon tunggal tersebut untuk memimpin kembali Kabupaten Pati. Karena hal inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat selaku pemilih disaat berlangsungnya pilkada serentak di Kabupaten Pati (Prihatmo, 2019).

Berdasarkan kelima hasil penelitian diatas membuktikan bahwa partisipasi masyarakat selaku pemilih disetiap daerah terdapat perbedaan, ada yang saat berlangsungnya pilkada serentak partisipasi pemilih mengalami peningkatan adapula yang mengalami penurunan karena adanya pasangan calon tunggal. Dalam kajian yang akan diteliti oleh peneliti fenomena calon tunggal tersebut meskipun baru pertama kali terjadi pada pemilukada tidak membuat masyarakat enggan untuk memilih melainkan malah terjadi peningkatan partisipasi pemilih. Dari hal ini menunjukkan bahwasanya memang kinerja paslon tunggal tersebut yang meyakinkan masyarakat untuk memilih calon tunggal daripada memilih kotak kosong. Selain itu terdapat keberhasilan dari pihak KPUD Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

## 2. Pemaknaan dan Sikap Politik Masyarakat

*Pertama*, artikel jurnal yang ditulis oleh Siti Malaiha Dewi dengan judul “*Sikap dan Pemaknaan Perempuan Marginal Terhadap Politik Uang: Studi Kasus Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Kudus*”. Dalam tulisan ini penulis menjelaskan mengenai sikap perempuan marginal memaknai praktik politik uang pada pemilu tahun 2014. Terdapat tiga sikap perempuan marginal mengenai politik uang yakni bersikap menolak politik uang, menerima politik uang dan menjadikan uang sebagai factor penentu pilihannya serta menerima uang tersebut namun tidak terpengaruh dengan pilihan politiknya. Dari sikap tersebutlah

bagaimana perempuan marginal memaknai politik uang itu sendiri (Dewi, 2015).

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Pratiwi Handayani yang berjudul “*Pemaknaan Tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne Terhadap Perubahan Politik Mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang*”. Di skripsi ini membahas terkait sikap mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah dalam memaknai tayangan ILC melalui teks media yang dinilai berdampak pada perubahan perilaku mahasiswa sebelum menonton dan setelah menonton. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya terdapat keterkaitan antara media dengan politik, karena dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan. Hasil dari penelitian ini akan terbagi menjadi tiga tipe dan makna, yakni dominant position, negotiated reading serta oppotional reading (Handayani, 2019).

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Zumrotun Na'imah berjudul “*Praktik Politik Uang dan Pemaknaannya Oleh Kelas Menengah dalam Pilkada 2017: Studi Kasus di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang*”. Sudut pandang penulis dalam penelitiannya adalah menunjukkan bahwa praktik politik uang yang terjadi di dalam masyarakat tidak melihat dari golongan manapun. Kajian ini membahas mengenai sikap masyarakat menengah yang ada di Kelurahan Kasepuhan dalam memaknai *money politics*, serta respon dan pandangan masyarakat kelas menengah terhadap praktik politik uang (Na'imah, 2019).

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Partogi Jonathan dengan judul “*Pemaknaan Ahok Sebagai Tokoh Politik Melalui Meme di Media Sosial dalam Membentuk Opini Pemilih Pertama Pada Pilgub DKI 2017*”. Dalam kajian ini dilihat bagaimana sikap pemilih pemula dalam memaknai Ahok sebagai tokoh politik melalui meme cover film yang terdapat di media social guna membentuk opini yang baik atau diminati pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi social

dengan asumsi dasar yakni tahap eksternalisasi, objektivasi, serta internalisasi (Jonathan, 2017).

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Fauzan Agam dengan judul “*Isu Identitas Agama dan Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019*”. Dalam suatu pemilihan kerap sekali dengan isu politik identitas, dan dalam kajian ini membahas terkait sikap masyarakat pada saat berlangsungnya pilpres tahun 2019 di Kota Palembang. Penelitian ini mengangkat isu politik identitas agama yang dikaitkan dengan sikap politik masyarakat selaku pemilih. Ditemukan bahwasanya dalam penelitian ini menunjukkan isu identitas agama pada pilpres 2019 sengaja untuk dibentuk dan dibuat oleh pendukung paslon masing-masing untuk menyerang serta mempertahankan elektabilitas agar menang dalam pilpres 2019 (Agam, 2020).

Kelima penelitian diatas mempunyai kesamaan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah terkait sikap dan pemaknaan dalam perpolitikan di Indonesia. Perbedaan penelitian terletak pada pembahasan kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Pembahasan tersebut yakni, melihat sikap serta respon masyarakat Kota Semarang dalam memaknai adanya fenomena calon tunggal yang terjadi pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Demokrasi Elektoral**

Dalam riset ilmu politik mempunyai beragam landasan teori guna mengkaji fenomena politik yang terjadi di dalam masyarakat. Penggunaan sebuah teori mempunyai signifikansi yaitu untuk mengcupas dan menganalisis fenomena politik yang terjadi di dalam masyarakat secara empiris dan komprehensif. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi electoral yang relevan pada penelitian ini dikarenakan adanya calon tunggal dinilai sebagai anomaly demokrasi.

Istilah electoral acapkali dikaitkan politik pemerintahan. Electoral ialah pemilihan yang kaitannya bersama pemilih. Pada demokrasi arti electoral ialah keikutsertaan seluruh elemen saat pemilihan umum atau pemilu guna memilih wakil pada parlemen juga kepala pemerintahan. Sementara makna demokrasi electoral yaitu sistem pembuat keputusan politik di mana individu mempunyai power dalam memutuskan lewat persaingan kompetitif merebut suara rakyat.

Robert A. Dahl mengemukakan 5 kriteria demokrasi sebagai ide politik (Dahl, 1985) :

1. Kesamaan hak pilih pada penentuan keterikatan keputusan kolektif.
2. Partisipasi efektif ialah kesamaan kesempatan seluruh masyarakat pada cara pengambilan keputusan kolektif.
3. Pembeberan kebenaran ialah terdapat kesamaan peluang setiap orang dalam menilai berjalannya kelogisan pemerintah serta proses politik.
4. Control terakhir agenda ialah terdapat keekklusifan kekuasaan masyarakat dalam memutuskan agenda yang diputuskan pada proses pemerintahan serta mewakilkan kekuasaannya kepada lembaga atau orang lainnya.
5. Pencakupan ialah terlangkupinya semua masyarakat dewasa yang berkaitan pada hukum.

Dalam pengertiannya Dahl yang terpenting ialah keterlibatan masyarakat pada proses formulasi kebijakan dengan pengawasan pada kekuasaan serta menjamin perlakuan yang sama dari negara pada unsur pokok demokrasi yaitu seluruh masyarakat.

Pemilihan umum ialah syarat negara menggunakan sistem demokrasi dikarenakan jadi parameter pengukur kedemokratisan negara dengan pelaksanaan pemilunya, pada UU No 22 tahun 2007 pemilu diartikan wadah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang luberjudil pada NKRI berdasar UUD 1945 dan pancasila.

Pemilu menjadi hak prinsipil warga negara sehingga menjadi keharusan pemerintah melakukan pemilu selaras asas mengenai rakyat

yang berdaulat maka penentuannya dikembalikan pada rakyat. Menjadi pelanggaran hak ketika pemerintah memperlambat atau tidak melaksanakan pemilu tanpa persetujuan wakil rakyatnya, pemilihan umum sendiri terbagi atas tiga, yakni pilukada, pemilu presiden serta wakilnya juga pemilu legislative.

Pilkada langsung ialah proses politik yang bukan hanya mekanisme politik dalam pengisian jabatan tetapi juga merupakan penerapan pelaksanaan otonomi atau kenyataan desentralisasi sebagai reaksi model pelaksanaan pemilu orde baru yang sentralistik dan tidak demokratis. Berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan hampir seluruh daerah di Indonesia sudah melaksanakan proses pilkada sebagai bukti menjadi konsesus nasional.

Dengan diadakannya pilkada langsung ternyata juga memunculkan peristiwa baru pada politik di Indonesia, yakni munculnya fenomena calon tunggal. Fenomena ini tengah eksis sejak beberapa tahun belakang. Terlebih fenomena calon tunggal seakan menjadi tren, karena selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Calon tunggal yang terjadi di beberapa daerah pada pilkada serentak dinilai sebagai demokrasi empiric yang merupakan secara normative keadaan yang tidak terbayangkan.

Munculnya pasangan calon tunggal di sejumlah daerah dalam ajang pilkada membuat esensi demokrasi terancam karena kedudukannya pada pilkada ketika dilihat dari asas pemilu. Adanya calon tunggal secara tidak langsung menghilangkan kontestasi sehingga pada hakikatnya bukan pemilu yang sesuai luberjurdil, kurangnya hak dipilih dan memilih karena pemilih berhadapan pada pilihan artifisial.

Kekhawatiran pilkada dengan calon tunggal dapat merendahkan kualitas demokrasi menjadi polemic ketika calon tunggal dibolehkan pada pilkada mungkin suatu saat penyelundupan hukum akan terjadi sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan liberalisasi pemilik modal dalam membeli partai politik untuk mencalonkan satu pasangan saja.

Fakta bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan perilaku masif, sistematis dan terstruktur dalam pendidikan politik sebagai cara peningkatan kualitas demokrasi dengan meningkatnya calon tunggal pada pilkada yang terkait kualitas demokrasi dan kesadaran politik.

Berdasarkan penjelasan diatas, teori demokrasi electoral relevan sebagai bahan menganalisis fenomena calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang tahun 2020.

## 2. Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Selain menggunakan teori demokrasi electoral, dalam penelitian ini akan memakai teori pilihan rasional sebab relevan bersama fenomena calon tunggal pada pilkada di Kota Semarang tahun 2020. Menurut KBBI, rasional artinya dari rasio yang bermakna kelogisan pemikiran normalnya sesuai nalar manusia. Sementara rasional ialah kelohisan pikiran seseorang sesuai pertimbangan akal sehatnya. Jadi dapat dipahami pilihan rasional ialah pilihan sesuai rasio akal bersamaan logikanya masing-masing.

Menurut pemikiran James S. Coleman terkait pilihan rasional, tindakan individu merujuk pada tujuan yang mana penentuannya sesuai nilai serta preferensi. Colomam menyatakan ada 2 unsur utama pemikirannya yaitu sumber daya juga aktor. Diasumsikan actor ialah individu berorientasi serta mempunyai pilihan bernilai dasar pemakaiannya guna menentukan pilihan sesuai pertimbangan mendalam secara sadar, juga punya power guna penentuan pilihan serta bertindak sesuai kemauannya berdasarkan sumber daya yang ada. Sumber daya ialah pengontrol aktor serta punya kepentingan tertentu, serta mampu dikendalikan (Amalia, 2014).

Asumsi dasarnya ialah umumnya manusia itu rasional, egois, selalu mengedepankan kemauannya serta utilitas. Pandangan ini mengasumsikan indivisusebagai aktor yang memiliki hak pilih khusus

(*set of properties*), termasuk selera atau preferensi tertentu (Firdaus, 2013)

Didunia politik teori ini erat hubungannya bersama studi kepemiluan yang mencerminkan bagaimana perilaku pemilih ketika penentuan pilihannya. Pada kajian *political behaviour*, ada 3 basis pendekatan dalam membaca perilaku pemilih antaranya The Columbia Study, The Michigan Model serta Rational Choice. Sebutan pendekatan ketiganya ialah sosiologis, psikologis dan pilihan rasional (Wicaksono, Muliarto, Fikri, & Selwa, 2021). Teori pilihan rasional *reliable* guna mengupas berbagai fenomena politik seperti fenomena pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Kota Semarang Tahun 2020. Dalam hal ini, peneliti akan melihat pilihan rasional masyarakat selaku pemilih dalam memilih calon kepala daerah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Peneliti memakai penelitian kualitatif deskriptif, yang menurut Denzin & Lincoln (1994) mengemukakan riset kualitatif ialah riset menempatkan realitas social dijadikan sebagai kajian kemudian dianalisis menggunakan metode yang ada. Riset kualitatif menurut (Anggito & Setiawan, 2018) riset yang menyandarkan pada penangkapan dan memotret realitas social yang terjadi di dalam masyarakat secara holistik, kompleks, dan rinci. Dalam konteks tersebut peneliti menggambarkan serta memaparkan mengenai peningkatan partisipasi masyarakat selaku pemilih pada saat pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang serta bagaimana masyarakat kelas menengah di Kota Semarang memaknai adanya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini memakai pendekatan *studi kasus* yakni proses memahami dan mengkaji kasus serta mencari hasilnya, dipilihnya pendekatan tersebut karena studi kasus berpusat pada perhatian satu

objek sebagai kasus yang dikaji mendalam agar bisa membongkarrealita di balik suatu peristiwa (Rahardjo, 2017). Fenomena dari penelitiyaitu mengenai peristiwa calon tunggal pada Pilkada Langsung tahun 2020.

## 2. Sumber dan Jenis Data

### a) Data Primer

Ialah perolehan dat langsung dari penggali informasi utama (informan) serta catatan lapangan tentang penlitian masalah. Pada penelitian ini, dipilih narasumber secara mendasar pada subjek yang terlibat serta harus memahami juga menguasai fokus permasalahan penelitian. Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu terdiri dari pihak KPU Kota Semarang, masyarakat kelas menengah di Kota Semarang serta tim sukses calon kandidat pilkada Kota Semarang Tahun 2020.

### b) Data Sekunder

Ialah penggunaan data guna pendukung data primer berupa journal,buku, internet, serta dokumen terkait penyelenggara pilkada.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data berupa:

### a) Observasi

Pengamatan atau observasi ialah suatu kegiatan yang tersusun secara sistematis memahami dan memotret problematika baik itu berhubungan dengan konflik fisik maupun konflik batin. Hasilnya seperti kejadian, aktivitas, objek, peristiwa, emosi seseorang serta situasi dan kondisi. Dilakukannya observasi mempunyai tujuan yaitu memvisualisasikan realitas sosial terhadap objek yang dijadikan kajian. Seberapa jauh dan mendalam peneliti mengerti mahami kondisi, problematika dan konteks dan memvisualisasikan sealamiah mungkin dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu riset

(Raco, 2010). Peneliti akan mengobservasi perilaku masyarakat selaku pemilih berkenaan dengan respon dan sikap mereka dalam memaknai adanya fenomena calon tunggal.

b) Wawancara (*In-Depth Interview*)

Wawancara ialah cara pengumpulan informasi yang valid bersumber dari narasumber yang sudah ditentukan. Hasil yang didapatkan dari proses wawancara tersebut guna menunjang tingkat komprehensifnya sebuah penelitian. Pertimbangan wawancara dilaksanakan dalam mengungkap informasi secara langsung dari subjek penelitian mengenai permasalahan penelitian (Newman, 2013). Peneliti akan mewawancarai beberapa informan yang nantinya akan membantu peneliti guna menggali lebih dalam tentang kajian yang diteliti oleh peneliti. Focus informan pada penelitian ini adalah pihak dari KPU Kota Semarang, masyarakat kelas menengah serta tim sukses calon kandidat.

c) Studi Dokumentasi

Peneliti memakai teknik studi dokumentasi yang menjadi cara yang dalam menunjang penelitian kualitatif guna memperoleh gambaran dari perspektif narasumber. Berbagai perspektif tersebut kemudian ditelaah kepercayaan dan bukti terjadinya suatu peristiwa. Hasil dari proses observasi dan wawancara akan lebih kuat lagi apabila ditunjang dengan dokumentasi terkait kajian yang diteliti (Satori & Komariah, 2009). Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa tulisan, arsip, notulensi rapat, serta dokumen-dokumen organisasi yang terdapat di KPU Kota Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif dari Bogdan dan Biklen (1990) analisis data yaitu proses guna mendapatkan data dan menyusun secara rinci yang bersumber penggunaan teknis pengumpulan data yang peneliti gunakan. (Rukajat, 2018). Menurut (Creswell, 2014) proses analisis data

memerlukan usaha pemaknaan data gambar atau teks sehingga diperlukan persiapan data untuk dianalisis, perbedaan analisis, memperkuat pemahaman data, menyajikan data serta menginterpretasi data secara luas. Creswell mengemukakan 6 langkah analisis data berupa:

1. Mengelola serta menyiapkan data.
2. Membaca seluruh data.
3. Meng-*coding* data.
4. Melakukan *coding* dalam pendeskripsian hal yang dianalisis.
5. Mendeskripsikan tema laporan atau narasi kualitatif.
6. Menjelaskan data

(Alsa, 2014) juga mengemukakan langkah analisis data berupa mengelompokkan segmen data dalam tema kategori, menganalisis sumber pengembangan tema serta menginterpretasi makna data dengan refleksi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Supaya penulisan ini mampu terfokus dengan baik juga mudah untuk dipahami, maka penulisan dibagi kedalam enam bab, antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memaparkan alasan latar belakang lalu merumuskan masalahnya. Selain itu dijabarkan pula tujuan, manfaat penelitian. Serta diuraikan metode dan pendekatan penelitian, definisi teori juga konsep serta bagaimana penyusunan sistematis menjadi satu kesatuan skripsi yang utuh.

### **BAB II KERANGKA TEORI : DEMOKRASI ELEKTORAL DAN PILIHAN RASIONAL**

Menjabarkan secara detail terkait teori-teori yang telah dimasukkan di dalam Bab I. serta diuraikan kembali dalam Bab ini dengan tujuan semakin

mematangkan penggunaan konsep teori sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisis dari data penelitian.

### **BAB III DESKRIPSI LOKASI KOTA SEMARANG**

Dipaparkan terkait ilustrasi umum mengenai Kota Semarang sebagai lokasi penelitian. Gambaran umum mengenai Kota Semarang akan dibagi menjadi enam sub bab pembahasan antara lain:

- a. Gambaran Umum Kota Semarang
- b. Letak dan Keadaan Wilayah
- c. Kondisi Sosial Budaya di Kota Semarang
- d. Kondisi Perekonomian di Kota Semarang
- e. Kondisi Politik di Kota Semarang
- f. Gambaran Khusus Calon Tunggal di Kota Semarang

### **BAB IV FAKTOR PENGARUH TINGGINYA ANGKA PARTISIPASI PEMILIH DI PILKADA KOTA SEMARANG TAHUN 2020**

Menguraikan hasil analisa dari temuan data-data di lapangan mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan KPU Kota Semarang serta tim sukses PDIP Kota Semarang dan Kesbangpol Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat berlangsungnya pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang.

### **BAB V SIKAP DAN RESPON MASYARAKAT MEMAKNAI CALON TUNGGAL**

Setelah menguraikan hal-hal apa saja yang dilakukan KPU Kota Semarang serta tim sukses PDIP Kota Semarang dan Kesbangpol Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat selaku pemilih, dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana sikap serta respon masyarakat dalam memaknai adanya fenomena calon tunggal pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang.

## **BAB VI PENUTUP**

Menyampaikan kesimpulan dari serangkaian penulisan penelitian yang dilakukan sebagai sebuah jawaban dari rumusan masalah yang diuraikan oleh penulis. Selain kesimpulan dari penelitian, dalam bab ini akan disajikan saran untuk penelitian dengan kajian serupa kedepannya.

## BAB II

### KERANGKA TEORI : DEMOKRASI ELEKTORAL DAN PILIHAN RASIONAL

#### A. Demokrasi Elektoral

##### 1. Pengertian

Electoran sering berkaitan politik pemerintahan. Elektoral sendiri ialah pemilihan yang merujuk pada pemilih. Dalam demokrasi elektoral ialah pemilihan umum oleh seluruh masyarakat guna wakilnya dipilih untuk parlemen serta kepala pemerintahan. Dimaknai juga sebagai sistem pembuat keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan lewat pertarungan kompetitif merebutkan suara rakyatnya.

Demokrasi electoral tidak sekadar mendapatkan wakil rakyat api lahir atas kemauan guna mewujudkan tujuan. Tentu maknanya tak hanya memilih tapi guna kemauan bersama tercipta (Wiratmaja, 2018).

Demokrasi electoral ialah tempat bersaing guna pemilihan seseorang yang layak serta berhak juga mampu sebagai pemimpin guna tujuan serta cita-cita bersama tercapai. Dengan demikian disebutkan bahwa pentingnya tak hanya proses pelaksanaannya saja tapi kualitas orang yang dipilih serta kiprahnya dalam perwujudan tujuan. Terpilihnya pemimpin berkewajiban menyeimbangkan dinamika keberagaman bersama keutuhan bangsa ini. Tumpuan ideal demokrasi ialah “kesatuan dalam keanekaragaman” juga isyarat dari pergaulan menyatakan terdapat konsesus juga konflik (Adrain, 1992).

Robert A. Dahl mengemukakan 5 kriteria demokrasi sebagai ide politik (Dahl, 1985) :

6. Kesamaan hak pilih pada penentuan keputusan kolektif yang mengikat.
7. Partisipasi efektif ialah kesamaan kesempatan seluruh masyarakat pada cara pengambilan keputusan kolektif.

8. Pembeberan kebenaran ialah terdapat kesamaan peluang setiap orang dalam menilai berjalannya kelogisan pemerintah serta proses politik.
  9. Control terakhir agenda ialah terdapat keekklusifan kekuasaan masyarakat dalam memutuskan agenda yang diputuskan pada proses pemerintahan serta mewakilkan kekuasaannya kepada lembaga atau orang lainnya.
  10. Pencakupan ialah terlangkupinya semua masyarakat dewasa yang berkaitan pada hukum.
2. Konsep Demokrasi Elektoral

Lahirnya konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berangkat dari proses kontemplasi para filsuf Yunani, rapi implementasinya di masa modern terjadi mulai abad 18 pascapergolakan revolusioner di masyarakat barat. Waktu tersebut menafsirkan demokrasi dengan beragam pengertian. Demokrasi bak gelombang yang selalu menyertai eksistensi dari kehendak rakyatnya. Walau begitu, sistem tersebut dipercaya bukan sebagai kesempurnaan final tapi tetap baik sebab mampu menjamin akomodasi bermacam kepentingan politik sesuai demokrasi.

Dewasa ini demokrasi ialah tema sentral pertumbuhan ekonomi-politik dunia, meliputi bermacam keterkaitan persoalan. Objek studi demokrasi sangat luas rentang pembahasannya. Belum surutnya diskursus tentang demokrasi hingga saat ini justru tambah berkembang signifikan. Berdasarkan studi David Collier dan Steven Levitsky terkait diskursus model demokrasi terdapat sekurangnya penawaran 550 model atau tipe dari demokrasi oleh sekitar 150 studi yang dikerjakan ilmuwan politik (Solikhin, 2021).

Kajian mengenai demokrasi electoral sesuai dengan konsep demokrasi pluralis yang mana prinsip utamanya ialah menjamin kelompok minoritas terhadap mayoritas serta bagi warga negaranya bebas berpolitik. Robert A. Dahl ialah ilmuwan kunci sebagai acuan dalam membincangkan model pruralis. Menurut Dahl, seberapa besar

demokrasi bekerja dapat dilihat dengan mengukur dua ukuran minimal (tingkat kompetisi serta partisipasi) (Dahl, Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol, 1985), yaitu:

- a. Setinggi apa tingkat kontestasi, kompetisi atau kemungkinan oposisi (*liberalisasi*).
- b. Sebanyak apa warga negara mendapat kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik (*inclusiveness*).

### 3. Komponen Demokrasi Elektoral

Terdapat dua jenis komponen dalam demokrasi electoral, yakni :

#### 1. Pemilu

Pemilu merupakan tempat persaingan guna menduduki jabatan politik di pemerintahan berdasarkan pilihan formal oleh rakyat serta syarat terpenuhi. Pesertanya bisa perorangan juga partai politik. Pemilu penting sekarang ini sebab memiliki keterkaitan dengan beberapa hal. *Pertama*, sebagai mekanisme penting guna berlangsungnya demokrasi perwakilan, penemuan mekanisme canggih supaya rakyat tetap berkuasa atas diri sendiri. *Kedua*, sebagai indikator bagi negara demokrasi Tak ada satupun pengklaiman negara demokratis tanpa pemilu. *Ketiga*, penting membicarakan terkait keluasan implikasi-implikasi dari pemilu. Gelombang ketiga ini menjadi kelemahan serta pengakhir rezim otoriter, yang mana pada fase ini Huntington (1992) menyebutkan pemilu sebagai alat juga orientasi demokratisasi (Pamungkas, 2009).

#### 2. Partai Politik

Karya Sigmund Neumann (1956) *Modern Political Parties*, menyatakan partai politik merupakan usaha aktivis guna menguasai pemerintahan serta memperebutkan dukungan rakyat lewat persaingan bersama golongan lain dengan perbedaan pandangan. Menurut Neumann, partai politik ialah perantara besar guna

penghubung kekuatan juga ideologis sosial bersama lembaga pemerintah (Budiardjo, 2008). Fungsi utama parpol yaitu mencari serta mengamankan kekuasaan guna penyusunan program sesuai ideologi tercapai. Tetapi pelaksanaan fungsilain juga tetap dilaksanakan tidak sistem politik demokrasi saja tapi juga otoriter. Fungsi lain yang dimaksud, antara lain :

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ialah terbentuknya sikap juga orientasi politik anggota masyarakat lewat sosialisasi tentang kehidupan politik berlangsung.

b. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah penyeleksian serta pemilihan juga pengangkatan seorang serta sekelompok orang guna pelaksanaan peranan umumnya sistem politik serta khususnya pemerintahan. Pentingnya fungsi bagi kelangsungan sistem politik ialah tanpa kalangan elit terancamnya sistem politik.

c. Partisipasi politik

Merupakan kegiatan warga negara guna mempengaruhi pembuatan serta pelaksanaan kebijaksanaan umum serta ikut penentuan pemimin pemerintahan. Fungsi parpol sebagai pembuka kesempatan, penyokongserta pengajak anggota masyarakat lain guna memakainya sebagai saluran kegiatan pemengaruh proses politik.

d. Pemadu Kepentingan

Fungsinya ialah guna penampung juga pemadu berbagai perbedaan juga pertentangan kepentingan. Setelah melkukan kegiatan itu lalu memperjuangkannya dalam membuat serta melaksanakan keputusan politik.

e. Komunikasi Politik

Ialah penyampaian informasi terkait politik dari pemerintahan ke masyarakat serta dari masyarakat ke pemerintah.

Ppenyampiannya tidak serta merta diberikan terapi dilakukan perumusan sehingga komunikasi gampang memaknainya.

f. Pengendalian Konflik

Kegunaan partai politik ialah pengendali konflik lewat dialog dengan pihak berkonflik, bermacam aspirasi ditampung serta dipadukan lalu dimusyawarahkan badan perwakilan rakyat guna penyelesaian serta dihasilkan keputusan.

g. Control Politik

Merupakan kegiatan penunjuk kekeliruan, kelemahan serta penyimpangan isi kebijakan atau saat melaksanakan kebijakan oleh pemerintah. Pelaksanaan control politik atau pengawasan, harus memiliki kejelasan tolak ukur yang mengakibatkan kekuatan bersifat objektif (Surbakti, 2010).

## **B. Pilihan Rasional (Rational Choice)**

### **1. Pengertian**

Menurut KBBI rasional berasal dari rasio bermakna kelogisan pemikiran atau umumnya sesuai nalar manusia. Sementara rasional merupakan pemikiran seseorang sesuai pertimbangan akalehat juga logis. Kesimpulannya yaitu kelogisan pemikiran seseorang sesuai pertimbangan akal sehatnya. Pilihan rasional dapat dipahami sebagai suatu pilihan sesuai rasio akal bersamaan logika pribadi. Kemunculan rasionalitas terjadi saat dihadapkan adanya pilihan didepan mata serta bebas dalam penentuannya juga dituntut harus ada pilihan. Diucapkan rasional jika pengambilan pilihannya sesuai kebutuhan. Konsekuensinya berupa sikap juga tindakan.

Teori pilihan rasional merujuk pada aksi seseorang untuk mencapai sebuah tujuan serta penentuan tujuan tersebut (dan juga aksi) berdasar pilihan atau (*preferensi*) nilai. Pada perilaku individu, *Preferensi* atau kepentingan dipengaruhi oleh kepentingan sosial. Keuntungan tidak

terbatas pada materi tetapi secara psikologis dan sosial seperti prestise atau penerimaan perilaku (Wittek, 2016).

Pada dasarnya penekanan manusia ialah pementingan organisme diri sendiri, sehingga mereka akan bertindak dengan cara yang menguntungkan dan mengurangi kerugian (Anggaunitakiranantika, 2013). Dapat disimpulkan bahwa teori pilihan rasional merujuk pada alasan mengapa tindakan itu dilakukan, serta terkandung kebaikan bagi individu juga penerimaan segala hal.

Asumsi dasarnya adalah bahwa manusia pada umumnya egois, rasional, selalu berusaha memaksimalkan utilitas serta keuntungan untuk diri sendiri. Pada pandangan ini, individu sebagai pelaku utama yang memiliki seperangkat properti tertentu, termasuk seperangkat selera atau preferensi tertentu (Firdaus, 2013).

Umumnya diasumsikan tindakan manusia pembimbingan tujuan serta maksud oleh tatanan hirarki preferensi. Dalam hal ini rasional berarti :

- a. Aktor menghitung preferensi serta utilisasi dalam pemilihan suatu bentuk tindakan.
- b. Penghitungan biaya setiap jalur pelaku oleh aktor
- c. Mengupayakan pemanfaatan guaa pilihan tergapai aktor (Damsar, 2011).

## 2. Konsep Pilihan Rasional

Konsep ini sangat kuat secara teoritis tapi jadi lemah saat mendefinisikan fenomena sosial (Boudon, 2009). Bermakna ketika memprediksi perilaku seseorang muncul. Namun, lemah saat menjelaskan ketidaksesuaian fenomena.. Tetatpi hal ni tidak menjadi penghambat dalam pngaplikasiannya khususnya psikologi politik, moral serta konsumen. Secara konseptual, teori ini baik dalam memprediksi perilaku saat kondisi tertentu. Perilaku pemilih masih butuh troti pilhan rasional bagi prediksikan perilaku.

James S. Coleman (2008), memandang teori pilihan rasional sebagai peluang dalam memperoleh integrasi paradigmatic. Teori ini berorientasi dari dasar individualisme metodologis serta memakainya dasar tingkat mikro untuk menggambarkan fenomena tingkat makro. Coleman ingin mendefinisikan fenomena level makro atau keluasan fenomena lewat pendekatan makro. Maksud makro ialah sistem sosial sementara mikro ialah individu. Gagasan tersebut terlihat jelas pada gagasan dasar bahwa aksi perseorangan merujuk pada orientasi penentuan tindakan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Menurut Coleman, sosiologi berfokus pada sistem sosial, di mana fenomena makro harus diartikan oleh faktor internal, terutama faktor individu. Alasannya dikarenakan intervensi guna perubahan sosial terwujud. Inti dari perspektif Coleman ialah teori sosial tidak hanya digunakan sebagai latihan akademis saja, tapi harus bisa berdampak pada kehidupan sosial lewat intervensi tersebut. Teori rasional mengilustrasikan seseorang berkehendak sebab adanya tujuan serta untuk menggapainya maka aktor memakai segala sumber dayanya supaya tujuan tercapai. Coleman berpendapat dibutuhkan ketepatan konsep tentang aktor rasional lewat ilmu ekonomi yang memandang aktor menentukan tindakan sesuai keinginan, kegunaan juga kebutuhannya. Teori pilihan Coleman punya unsur utama dua yaitu aktor dan sumber daya.

Sumber daya ialah terdapatnya potensi yang dipunya bisa berupa sumber daya alam juga sumber daya manusia. Definisi sumber daya alam ialah ketersediaan atau kepemilikan potensi alam, sementara sumber daya manusia ialah kemampuan atau potensi seseorang. Aktor ialah pelaksana tindakan, yaitu kemampuan individu memanfaatkan sumber daya dengan baik. Aktor diasumsikan individu yang memiliki tujuan, juga punya suatu pilihan yang bernilai dasar sebagai penentuan pilihan dengan pertimbangan mendalam sesuai kesadarannya, juga terdapat kekuatan guna mengupayakan penentuan pilihan juga tindakan sesuai kemauannya. Sementara sumber daya adalah kemauan aktor

dalam mengontrol kepentingan tertentu. Berdasarkan dua elemen ini, interaksi mereka mengacu pada tingkat sistem.

Dalam kehidupan nyata, Coleman mengemukakan bahwa individu tidak selalu berperilaku atau bahkan bertindak rasional. Melainkan dinilai apakah tindakannya bersifat rasionalitas atau malah menyimpang dari pengamatan caranya. Pemasatannya lewat hubungan makro ke mikro juga bagaimana individu menciptakan perilaku sistem rasional. Keterbatas sumber daya juga tindakan aktor menjadi sumber tujuan utama pilihan rasional.

Ditekankan dalam teori pilihan rasional ini bahwa pelaku utama sebagai kunci yang paling penting di dalam melaksanakan sebuah aksi atau tindakan. Sebab pelaku utama atau aktor utama berusaha agar tindakan maksimal yang ingin dicapai dengan meraih atau memilih opsi yang dianggap membawa hasil yang paling penting. Sebagai contoh, apabila opsi 1 dianggap lebih penting serta bermakna daripada opsi 2 dan 3, maka pelaku utama atau aktor akan memilih opsi 1 sebab aktor mampu mengetahui potensi serta kemauannya.

Penggunaan teori pilihan rasional sebagai alat untuk berpikir logis dan rasional dalam pengambilan keputusan. Pilihan atau cara pengambilan seseorang merupakan sesuatu yang telah dipikirkan serta dipertimbangkan sebelumnya hingga akhirnya terbentuk suatu keputusan yang dianggap rasional. Pilihan seseorang tentunya bukan tanpa alasan atau bisa dikatakan mempunyai alasan tertentu. Menurut Coleman, menggambarkan seseorang melakukan suatu tindakan dengan memanfaatkan suatu barang atau sumber daya untuk memenuhi suatu kebutuhan.

Pada konsepsi sederhana mengenai sebuah sistem pilihan, terdapat batasan pada jenis pilihan atau aktor. Keseluruhan dilaksanakan dengan satu tujuan yakni realisasi kepentingan aktor meningkat. Berbagai pilihan ada tergantung pada kendala situasi. Adapun tiga jenis pilihan (Coleman, 2008) :

1. Pilihan sederhana, diberlakukan kuasa atas sumber sebagai kepentingan seseorang serta yang dikuasi agar kepentingan terpenuhi. Namun, pilihan ini sangat kecil secara social (kecuali jika ia memiliki pengaruh terhadap orang lain) serta mampu terabaikan begitu saja, karena aktor lain tak terlibat.
  2. Pilihan besar, landasan kepentingan atas perilaku serta kekuasaan seseorang aktor. Umumnya dikerjakan lewat sumber-sumber yang ia miliki, dengan bertukar kuasa atas kurangnya sumber daya sebagai kepentingannya dengan kuasa atas kepentingan sumber. Mengikuti tujuan guna meningkatkan upaya seseorang dalam merealisasikan kepentingannya apabila ia memiliki kekuasaan dibanding tidak berkuasa.. Lazimnya, diasumsikan kuasa atas suatu sumber oleh seorang pelaku memungkinkan dirinya untuk merealisasikan kepentingan apa pun yang dia miliki terhadap sumber tersebut.
  3. Pilihan yang dapat diambil, dilakukan secara luas dalam sistem sosial, yaitu penyerahan kekuasaan secara sepihak atas sumber daya yang menjadi kepentingan seseorang. Pengalihan ini dilaksanakan ketika asumsi yang mendasari opsi jenis kedua (bahwa seseorang dapat memenuhi kepentingannya dengan memperoleh kekuasaan atas sumber daya yang menjadi kepentingannya) tidak lagi digunakan. Dengan kata lain, seorang aktor mentransfer kontrak atas sumber daya secara sepihak ketika dia percaya bahwa kekuatan aktor lain atas sumber daya ini akan lebih mungkin untuk memenuhi kepentingannya daripada jika dia memegang kekuasaan tersebut.
3. Rasionalitas Masyarakat dalam Partisipasi Politik
- Sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial dalam meningkatkan partisipasi politik belum tentu mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik secara optimal. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik. Terlepas dari pengertian manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya

manusia adalah makhluk individu. Makhluk individu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Secara rasional, terdapat beberapa hal yang dapat mendorong partisipasi politik masyarakat yakni, dorongan sosialisasi politik, dorongan *peer group*, serta dorongan pengalaman organisasi (Diah Astanti; Moh. Mudzakir, 2016). Pertama, dorongan sosialiasi yang digelar oleh tim sukses masing-masing pasangan calon yang dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum. Sosialiasi yang mengandung *content* atau isi memberikan pengetahuan tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum (politik). Kedua, dorongan *peer group* menjadi salah satu motivasi bagi pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, dorongan *peer group* cukup berdampak pada pemilih pemula, sebab dengan dorongan atau ajakan dari teman sebaya, pemilih pemula merasa lebih nyaman dengan suasana tersebut, bahkan menimbulkan sikap antusias dalam pemilu.. Ketiga, dorongan pengalaman organisasi. Organisasi politik juga dapat menjadi sarana untuk jauh lebih memahami mengenai politik, memberikan kesadaran pentingnya partisipasi dalam politik secara rasional. Selain itu, terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi rasionalitas masyarakat selaku pemilih dalam suatu pemilihan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi berubah-ubahnya perilaku pemilih antara lain (Elly M. Setiadi; Usman Kolip, 2013):

1. Perilaku elit lokal, hampir menjadi hal biasa, setelah pemilihan usai tim sukses baik dari sektor bisnis ataupun sektor pemerintah untuk menghitung semua kontribusi mereka selama proses pemilihan. Pengaruhnya terhadap sektor pemerintahan terjadi pembagian kekuasaan dan posisi arena baru dalam pembagian kuasa itu.
2. Politik kekuasaan primordial, agama bukan merupakan faktor penentu dalam pemilihan calon kepala daerah. Suatu misal dengan penganut agama Katolik merupakan agama mayoritas, maka hampir tidak terlihat isu agama menjadi factor yang mempengaruhi

persaingan antara calon di Flores. Sedangkan agama Islam yang menjadi agama mayoritas kedua, maka biasanya di daerah yang cukup signifikan akan mengisi posisi wakil calon kepala daerah.

3. Konsep kerakyatan, bisa dikatakan seperti politik massa yang mengambang di pemerintahan Orde Baru Suharto yang berdampak lemahnya *civil society* di depan negara. Pada masa Orde Baru, politik dijauhkan dari rakyat melalui politik massa yang mengambang. Rakyat hanya diikutsertakan selama pesta lima tahunan, yakni pemilihan umum yang hasilnya bisa dilupakan. Setelah itu, masyarakat hanya dikerahkan untuk memberikan dukungan terhadap program pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi dalam pembangunan tidak lain adalah mobilisasi dukungan terhadap program pembangunan pemerintah.

### BAB III

## DESKRIPSI LOKASI KOTA SEMARANG

### A. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan sebuah kota Metropolitan serta ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang pula juga merupakan kota maju yang ada di Pulau Jawa. Penduduk Kota Semarang kurang lebih mencapai 2 juta jiwa. Kota Semarang memiliki luas daerah sebesar 373,70 km<sup>2</sup> yang lokasinya berhimpitan langsung dengan Kabupaten Kendal pada daerah bagian barat, kemudian daerah bagian timur dengan kabupaten Demak dan Grobogan, lalu daerah bagian selatan dengan Kabupaten Semarang, serta pada bagian selatan dengan Kabupaten Semarang, dan pada bagian utara dengan Laut Jawa. Adapun garis pantai yang dimiliki oleh Kota Semarang berkisar 13,6 km. Kondisi geografis Kota Semarang bisa diamati dari gambar dibawah:

Gambar 1

Peta Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang

Visi beserta misi dari Kota Semarang tercetak jelas dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Semarang Tahun 2021-2026, yaitu dengan Visi “**Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera**”. Dibawah ini merupakan misi Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintah yang Semakin hHandal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan BerbasisKkeunggulan Local dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif.

## **B. Letak dan Keadaan Wilayah**

Kota Semarang dikenal sebagai kota strategi dikarenakan masuk pada jalur lalu lintas perekonomian Pulau Jawa. Letak geografis dari Kota Semarang yaitu beraa diantara 6.50' – 7,10' LS serta 109.35' – 110.50' BT. Kota Semarang memiliki luas daerah sebesar 373,70 km<sup>2</sup> yang lokasinya berhimpitan langsung dengan Kabupaten Kendal pada daerah bagian barat, kemudian daerah bagian timur dengan kabupaten Demak dan Grobogan, lalu daerah bagian selatan dengan Kabupaten Semarang, serta pada bagian selatan dengan Kabupaten Semarang, dan pada bagian utara dengan Laut Jawa. Adapun garis pantai yang dimiliki oleh Kota Semarang berkisar 13,6 km. Suhu dari Kota Semarang memiliki kisaran diantara 20-30 C serta suhu rata-ratanya yaitu 27 C. Kota Semarang memiliki ketinggian diantara 0,75 – 359,00 M diatas permukaan laut. Kota Semarang merupakan kota yang terdiri atas dataran tinggi serta rendah. Wilayah perbukita atas disebelah selatan dari kota terkenal dengan julukan Semarang atas dengan ketinggian 90-359 M diatas permukaan laut, sedangkan wilayah dataran rendahnya berada di ketinggian 0,75-4,5 M diatas permukaan laut serta terkenal dengan

julukan Semarang bawah. Berdasarkan dengan letak geografis, iklim Kota Semarang dipengaruhi dengan iklim tropis.

Kota ini juga dikenal dengan posisinya yang strategis untuk menjadi pondasi pembangunan Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan kota Semarang mempunyai 4 simpul pintu gerbang dibagian utara, selata, timur, serta barang. Kota Semarang juga memiliki peranan yang penting bagi perkembangan daerah Jawa Tengah, yang mana mempunyai pelabuhan, jaringan transportasi darat, serta jaringan transportasi udara yang berpotensi menjadi simpul transportasi publik di Jawa Tengah.

Kota Semarang mempunyai luas wilayah 373,70 Km<sup>2</sup> atau 37.366.836 Ha serta mempunyai 16 Kecamatan dan 117 Kelurahan. Penduduk Kota Semarang sangat heterogen serta mempunyai sejumlah etnis, misalnya Etnis Jawa, Cina, Arab serta keturunan dari etnis-etnis lain yang berasal dari sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Beberapa masyarakat yang tinggal di Kota Semarang merupakan masyarakat pendatang dari luar daerah maupun luar pulau. Rata-rata orang-orang yang berpindah tinggal atau bahkan menetap di Kota Semarang memiliki tujuan untuk menuntut ilmu dan juga untuk bekerja. Kebanyakan masyarakat Kota Semarang merupakan muslim, lalu penganut agama kristen, katolik, hindu, serta budha.

Jenis pekerjaan dari masyarakat Kota Semarang juga beragam, contohnya karyawan pemerintahan, pedagang, petani, maupun para pengusaha atau para pelaku industry. Meskipun masyarakat yang tinggal di Kota Semarang sangat beragam namun kehidupan social masyarakatnya sangat damai. Hal tersebut juga dijadikan sebagai faktor yang meningkatkan keamanan wilayah, serta Kota Semarang sendiri juga dijadikan sebagai kota yang baik bagi pembangunan bisnis serta investasi. Fasilitas yang terdapat di ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini juga sangat beragam, mulai dari fasilitas pelabuhan, terminal, bandara, fasilitas pendidikan hingga perguruan tinggi, fasilitas perbelanjaan kawasan bisnis dan fasilitas lainnya.

### C. Kondisi Sosial Budaya di Kota Semarang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terbuka pada budaya luar. Munculnya sejumlah kelompok yang terpisah dari ras merupakan sebuah tanda jika terdapat sistem pengotakan kelompok yang akhirnya meningkatkan aktivitas diskriminasi. Terbentuknya kelompok ini bisa saja meningkatkan semangat solidaritas, namun juga bisa memecah suatu bangsa. Sehingga perlu adanya kepentingan, nasib, serta ideologi yang sama untuk menyatukan masyarakat yang majemuk ini (Nasikun, 1984).

Kota Semarang adalah kota dengan masyarakat yang heterogen. Masyarakat Kota Semarang juga banyak dari masyarakat luar daerah yang bertempat tinggal dengan segala kepentingannya di Semarang. Semarang juga mempunyai sejumlah universitas, sekolah, hingga perguruan tinggi yang menarik minat masyarakat lain untuk tinggal di Semarang. Di bawah ini merupakan data mengenai penduduk dan agamanya tahun 2020:

Tabel 1

Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa) di Kota Semarang Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa)						Jumlah
	Islam	Katolik	Protestan	Budha	Hindu	Lain-lain	
Jumlah	147044 2	86166	116744	10894	1236	427	168590 9

Sumber : BPS Kota Semarang Tahun 2020 (diolah)

Meskipun masyarakat Kota Semarang sangat heterogen, tetapi kehidupan dari masyarakatnya juga terpantau rukun. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya sikap toleransi yang tinggi diantara sesama. Faktor tersebut juga dapat mendukung keamanan Kota Semarang, sehingga cocok dijadikan sebagai kota untuk mengembangkan investasi serta bisnis berkepanjangan.

Sejumlah keberagaman etnis yang terdapat di Semarang mempunyai latar belakang dari *tagline city branding* Kota Semarang, “*Variety of*

*Culture*”. Hal ini memiliki makna jika Kota Semarang akan berkembang serta memastikan bahwa budaya yang dimilikinya heterogen dengan toleransi tinggi. Pesan yang bisa diambil dari *tagline* tersebut yaitu adanya keselarasan serta keharmonisan diantara masyarakat yang secara bersama mengembangkan Kota Semarang.

Kota ini juga mempunyai budaya yang beragam, dimana bisa dijadikan sebagai daya tarik untuk menarik minat masyarakat maupun turis agar melakukan kunjungan ke Kota Semarang. Sehingga hal ini juga berdampak pada timbulnya keberagaman variasi didalam kehidupan masyarakat. Contoh nyatanya yaitu kesenian, bangunan bersejarah, agama, kuliner, serta yang lain. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Kota Semarang memiliki budaya yang didominasi oleh masyarakat Jawa, Arab, Pesisir, hingga China.

Logo Kota Semarang yang dijadikan sebagai pelengkap yaitu “Warak Ngendog”, yang merupakan binatang mitologis serta mempunyai simbol yang menyatukan 3 etnis mayoritas dari Kota Semarang. Bagian tubuhnya mempunyai bentuk naga (Cina), Buroq (Arab), serta Kambing (Jawa). Binatang tersebut seringkali dipakai menjadi maskot pada festival dugderan yang dilaksanakan dalam beberapa hari menjelang bulan puasa.

Makna yang tersimpan dari simbol tersebut adalah pedoman hidup manusia didalam segala zaman. Perwujudan dari makhluk rekaan tersebut adalah tergabung dari 3 simbol etnis yang memberikan cerminan atas persatuan serta akulturasi budaya di Kota Semarang. Simbol ini pula yang mendeskripsikan jika warga Kota Semarang mempunyai sifat terbuka, berbicara jujur, lurus, dan tidak adanya ungkapan yang berbeda antara hati maupun lisan.

Warna yang dipilih untuk menjadi simbol daerah yaitu:

1. Merah : wujud perlambangan kebudayaan Cina.
2. Hijau : wujud perlambangan budaya Arab.
3. Jingga : wujud perlambangan budaya Jawa.
4. Biru : wujud perlambangan budaya Pesisir.

Budaya di Kota Semarang dibangun agar dapat membina, mengembangkan, serta melestarikan budaya daerah agar menjadi budaya integral nasional. Sejumlah kelompok seni budaya, baik itu budaya tradisional atau modern harus diberikan motivasi seterusnya untuk melestarikannya. Sehingga masyarakat juga dapat mengembangkan budaya ini hingga ke anak cucu. Pemerintahan Kota Semarang juga mendukung pelaksanaan pelestarian ini dengan mendirikan Taman Raden Saleh Kota Semarang untuk mengumpulkan sejumlah fasilitas yang mendukung pemeliharaan budaya Kota Semarang.

#### **D. Kondisi Perekonomian di Kota Semarang**

Ekonomi yang berangsur tumbuh pada suatu wilayah dapat meningkatkan pendapatan daerah. Apabila pemerintah daerah tersebut dapat memahami potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, maka PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) suatu wilayah juga akan semakin besar. PDRB maupun PAD yang semakin meningkat ini dapat mewujudkan secara nyata mengenai tujuan dari adanya otonomi daerah. Salah satu indikator terpenting dalam mengamati keadaan ekonomi pada suatu wilayah bisa digambarkan dari data PDRBnya. Tingkat PDRB ini juga dijadikan sebagai indikator untuk melakukan penilaian kinerja ekonomi dalam suatu daerah dengan periode tertentu. PDRB juga bisa dimanfaatkan dalam mengamati perubahan nilai produk, besaran laju perkembangan ekonomi, serta struktur ekonomi dalam 1 periode disuatu wilayah (Fajar, 2018).

Tabel 2

PDRB Per kapita Kota Semarang Tahun 2017-2019

Kota Semarang	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		
	2017	2018	2019
	91,19	98,10	105,93

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Semarang

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan jika setiap tahunnya PDRB Per Kapita Kota Semarang selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Perekonomian Kota Semarang berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku selama, 2019 menghasilkan nilai Rp 191.547,22 serta atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 140.326,26 miliar. Ekonomi Kota Semarang Tahun 2019 tumbuh 6,86%, menguat dibandingkan pencapaian pada 2018 (6,52%). Dari sisi produksi, pertumbuhan paling tinggi ada di Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian (15,77%).

Pembangunan perekonomian juga dijadikan sebagai titik terberat di Kota Semarang. Hal ini juga terkait dengan tujuan pembangunan agar dapat melakukan perwujudan terhadap masyarakat yang makmur, adil, material, serta berjiwa spiritual sesuai dengan Pancasila maupun UUD 1945. Ini juga terkait dengan tujuan Kota Semarang agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah dengan optimal.

Melihat dari sejumlah data yang dipaparkan oleh BPS Kota Semarang, maka sektor yang mendominasi ekonomi di Kota Semarang yaitu perdagangan, hotel, dan restoran, lalu disusul oleh sektor industri dan pengolahan serta sektor bangunan. Keadaan ini juga seolah-olah memberikan penegasan jika Kota Semarang merupakan kota dagang serta jasa. Perkembangan ekonomi Kota Semarang yang didominasi oleh hotel, restoran, hingga perdagangan ini tidak lepas dari sejumlah fasilitas transportasi yang memadai, misalnya adanya Bandar udara ataupun transportasi darat pendukung lainnya.

## **Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kelas Menengah**

### **1. Pengertian Kelas Menengah**

Pandangan klasik mengenai kelas kelas yang berkembang di masyarakat sudah ada sejak abad ke-19 lewat teori Thorstein Veblen (1899) dan Karl Marx (1977). Veblen dalam teori "*leisure class*" yang menggolongkan masyarakat menjadi dua kelas yakni, kelas pekerja yang berusaha dalam melangsungkan hidupnya dan satu kelas yang

memiliki banyak waktu luang dikarenakan hartanya. Sedangkan Marx menggolongkan kelas masyarakat sesuai kontrol produksi yakni, kaum *bourgeoisie*, *proletarian*, dan *petty bourgeoisie*. Kelas *bourgeoisie* ialah kelas yang tak membutuhkan pekerjaan guna memperoleh pendapatan dikarenakan mempunyai control atas kepemilikan factor produksi, kelompok ini juga mempunyai *power* mengeksploitasi para pegawai dalam menghasilkan pendapatan. Lalu Robinson serta Goodman (1996) merujuk atas pembagian kelas oleh Marx, memaparkan terdapat beda yang sangat jelas diantara kelas *bourgeoisie* yang merupakan pemilik kapital dengan "the professional middle class" yang mengelola modal serta yang memiliki keahlian dalam pengelolaan modal (Robinson; Goodman, 1996).

Argumen tentang pembagian kelas di masyarakat ini lalu tersebar di berbagai negara bergantung pada penekanannya pada ciri-ciri ekonomi, social budaya, serta politik. Lalu bermunculan kalangan menengah yang berdasarkan banyak pihak dipandang sebagai golongan kelas masyarakat yang kuantitasnya terbanyak di bank dunia (world bank, BCG). Kecenderungan kelompok menengah ini diawali dari negara maju di Amerika dan Eropa lalu menjalar ke kawasan timur termasuk Asia Tenggara.

Arti kelas menengah bisa ditetapkan melalui berbagai macam pendekatan. Salah satunya ialah melalui pendekatan absolut. Pendekatan tersebut memaknai kelas menengah sesuai total penghasilan ataupun pengeluaran sebuah rumah tangga, seperti Kharas dan Gertz (2010) yang mengartikan kelas menengah ialah masyarakat yang pengeluaran hariannya antara \$10 sampai \$100 per individu dalam *purchasing power parity terms*. Berikutnya Benerjee dan Duflo (2007) melakukan pengukuran kelas menengah bawah melalui pengeluaran per 1 hari anatar \$2 sampai \$4 setiap orang dan kelompok menengah atas dengan pengeluaran setiap harinya antara \$6 sampai \$10 setiap orang pada negara berkembang. Sedangkan, Boumphrey dan Bevis (2013)

dengan memakai data penghasilan memaknai kelas menengah kedalam beberapa macam definisi, antara lain: rumah tangga yang berpenghasilan 50% sampai dengan 100% dari rerata penghasilan kotor agregat, rumah tangga yang pendapatan guna konsumsi paling sedikit \$10.000 setia tahunnya (bagi negara maju), ataupun *discretionary income* lebih besar dari 30%. Sudut pandang yang tidak sama disampaikan Gunn (1993) yang menyampaikan ciri-ciri kelompok menengah tak hanya tergantung pada kondisi perekonomian namun, juga pada jenis politik serta demokrasi. Gunn membuat kesimpulan bahwa Brunei Darussalam masuk dalam *under-developed civil society* dikarenakan dicirikan dengan ikut serta serta partisipasi masyarakat dalam berpolitik masih rendah. Argumen ini menunjukkan bahwa meskipun umumnya masyarakat sejahtera secara ekonomi namun, tidak diklasifikasi ke dalam kelas menengah (Vanda Ningrum; Intan Adhi Perdana Putri; Andini Desita Ekaputri, 2014).

Aktor utama dalam perubahan ialah kelas menengah. Meskipun masih diperdebatkan secara definitive “kelas menengah”, tapi tetap ada kekhasan yang mampu dimengerti oleh publik jika ia pasti diisi oleh suatu kelompok tertentu lalu ditetapkan arah perubahan budaya, dan sosial ekonomi masyarakat. Keseluruhannya kelompok menengah mencerminkan keberagaman ideologi sebab asalnya dari berbagai aliran sejarah. Utamanya di Indonesia yang merupakan negara majemuk dan besar, kontestasi dari aliran kelas menengah, dengan kondisi kehidupan social, perpolitikan, perekonomian serta budaya bisa sewaktu-waktu mengalami perubahan, cepat ataupun lambat. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya variasi kelompok serta membawa rumusan landasan idiil yang beragam (Savran Billahi; Idris Thaha, 2018).

Pendefinisian kelas menengah terus diupayakan beberapa kaum antar disiplin keilmuan seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, politik serta lainnya. Kesepakatan antarsebagian akademisi upaya mendeskripsikannya harus ditarik atas serangkaian tuntutan sejarah dan

penggolongan oleh ahli didalam mengartikan kelas.. Kelas berarti secara historis melekat erat dengan sejarah masyarakat. Dapat dimengerti yang mana sejarah berkembangnya masyarakat kerap disokong oleh eksistensi golongan social yang stratifikatif, seperti tuhan dan hambanya, tuan tanah dan pekerjanya, bos dan buruhnya, pejabat dan rakyatnya, dan lainnya (Linklater, 2001).

Stratifikasi kelas paling berpengaruh di Indonesia ialah kelas menengah dengan struktur dinamis. Tetapi studi akan kajian kapitalisme, peran juga konsumerisme fokus terhadap non radikal secara ekonomi serta non konservatif social dan budaya, pengkajiannya cenderung jauh didalam penelitian yakni kalangan menengah sebagai agen perubahan stratifikasi sosial pada yang terdominasi kalangan elit menjadi studi yang menarik serta menantang sendiri khususnya diperkotaan terjadinya industrialisasi. Barunya kelas menengah diharapkan mampu paling berpengaruh (Heryanto, 1999).

## 2. Indikator Masyarakat Kelas Menengah

### a. Kekayaan

Sejatinya golongan menengah memiliki separuh lahan pertanian dari kelas atas. Bentuk rumah kalangan atas ialah bagian kelas menengah yang berkebalikan desainnya dari kaum atas (sederhana, lantai keramik). Rumah panggung belakang juga terdapat pada kelas menengah serta penyatuan rumah bat (semi permanen). Luas bangunan ruangan 8 m<sup>2</sup> per orang, dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi luar.

### b. Pendidikan

Stratifikasi dari tingkat pendidikan ialah strata menengah bagi bertamatan S1, D3, dan D2. Tokoh masyarakat juga terlihat sebagai kaum menengah.

### c. Ekonomi

Umumnya pengelompokan batasan ekonomi tak ada patokan terkait penghasilan dengan total tertentu digolongkan ke status sosial tertentu pula. Tapi pengelompokannya tercermin dari faktor gaya hidupnya semisal kelas atas kebutuhan primer, sekunder, serta tersiernya terpenuhi sementara menengah hanya primer serta sekunder terpenuhi. Daging, susu atau ikan tiap harinya mampu dikonsumsi.

d. Gaya Hidup (*life style*)

Perbedaan jelas ditampilkan gaya hidup kelas sosial satu dengan kelas bawah.. Lokasi liburan kelas menengah bukan diluar negeri tapi cukup di Bali, Lombok, Yogyakarta, atau Jakarta, serta sekali dalam tiga bulan dilaksanakan rekreasi. Kemudian soal berpakaian, kelas menengah terdapat perbedaan antara sekolah, rumah, kerja juga bergeser.

e. Peluang Hidup dan Kesehatan

Tingginya kelas sosial orang tua, kematian bayi tahun pertama jadi kecil. Ekonomi anggota tinggi acapkali menikmati sanitas (Brook,2004),. Tindakan pencegahan seperti memperbaiki perawatan medis serta bila jatuh sakit masih terdapat tabungan hasil penyesuaian penghasilan guna pengobatan. Dan dalam kelas menengah, bila anak sedang sakit akan langsung dibawa ke sarana/petugas kesehatan serta punya asuransi kesehatan.

f. Respons Terhadap Perubahan

Sebagian kelas menengah yang berpendidikan relatif memadai cenderung responsif terhadap perubahan ide baru alhasil cepat dalam pemanfaatan manfaat program serta inovasi baru..

g. Peluang Bekerja dan Berusaha

Banyak dan tingginya uang serta pendidikan yang diampu mengakibatkan kemudahan mencari pekerjaan serta membuka usaha sesuai minat.

h. Kebahagiaan dan Sosialisasi dalam Keluarga

Kebutuhan lebih terpenuhi bagi orang kaya mengakibatkan timbul kebahagiaan daripada orang kurang mampu, Kemungkinan juga pertikaian serta persilihan relatif kecil antaranggota keluarga (Horton dan Hunt, 1987).

i. Perilaku Politik

Afiliasi kelas menengah menganggap karirnya dalam politik menanjak serta kecenderungannya memiliki kesamaan sikap seperti kelas atas seperti konservatif juga terhirndar sikap radikal (Iptek, 2016).

3. Profil Masyarakat Pondok Ngaliyan Asri Sebagai Kelas Menengah

Perumahan Pondok Ngaliyan Asri (PNA) merupakan suatu perumahan yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hamka, Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. Dilansir dari rumah.com, perumahan pondok ngaliyan asri dikenal sebagai perumahan yang lokasinya terletak strategis dan bebas dari banjir. Perumahan pondok ngaliyan asri ialah salah satu hunian yang berada di Ngaliyan yang dimana ketika akan memasuki perumahan ini terdapat gapura besar yang menunjukkan nama perumahan.

Gambar 2

Perumahan Pondok Ngaliyan Asri



Sumber: Google

Jumlah rumah yang terdapat di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri (PNA) adalah sebanyak 61 rumah dengan jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 37 KK dan jumlah warga yang terdapat diperumahan ini sebanyak 125 orang. Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti, ditemukan mata pencaharian warga di perumahan pondok ngaliyan asri beragam, mulai dari Pengusaha, Wiraswasta, PNS, Dosen, Guru, TNI, Polri dan lain sebagainya.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri (PNA). Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa perumahan PNA dapat dikategorikan masyarakatnya termasuk kategori masyarakat kelas social menengah. Alasan lain peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian adalah, karena peneliti telah menetap di perumahan pondok ngaliyan asri selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2018. Oleh karena itu, peneliti telah memahami keadaan lingkungan di perumahan ini dan melihat secara langsung kondisi social ekonomi warga perumahan pondok ngaliyan asri telah memenuhi semua indicator masyarakat kelas social menengah.

Pemilihan narasumber dilakukan melalui random sampling yang dimana peneliti telah mengamati bahwa ke-11 narasumber yang akan peneliti wawancarai telah memenuhi semua indicator masyarakat kelas menengah. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan satu persatu dari ke-11 narasumber dari setiap indicator masyarakat kelas menengah. Berikut 11 narasumber masyarakat kelas menengah:

1. Pak Ahmad & Ibu Ani

Pak ahmad dan Ibu Ani adalah seorang suami dan istri yang dimana pak ahmad bekerja sebagai seorang kontraktor sedangkan Ibu Ani adalah seorang ibu rumah tangga. Mereka mempunyai beragam bisnis mulai dari usaha franchise sampai pemilik dua buah kost-kostan. Dari segi pendidikan Pak Ahmad maupun Ibu Ani mempunyai gelar S-1. Untuk segi ekonomi dan life style dilihat dari rumah yang dimiliki sampai

kendaraan berupa dua mobil SUV dan dua buah motor sudah dapat dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah. Dalam hal respons terhadap perubahan dan perilaku dalam berpolitik dapat terbilang sebagai masyarakat yang peka terhadap suatu perubahan dan mengikuti perpolitikan yang terjadi di Indonesia terlihat dari respon ketika diwawancarai oleh peneliti.

#### 2. Pak Soperiyadi & Ibu Lili

Pak Soepriyadi adalah seorang pensiunan karyawan swasta yang bekerja di bidang alat berat sedangkan Ibu Lili adalah seorang ibu rumah tangga. Dari segi pendidikan Pa Soepriyadi merupakan lulusan S-2 sedangkan Ibu Lili merupakan lulusan S-1. Untuk segi ekonomi dan life style dilihat dari rumah yang luas dengan furniture yang mewah dan memiliki sebuah mobil sedan dan buah motor sudah dapat dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah. Dalam hal respons terhadap perubahan dan perilaku dalam berpolitik dapat dikatakan sebagai masyarakat yang paham akan perpolitikan dilihat dari wawasan yang dimiliki ketika wawancara dengan peneliti.

#### 3. Mas Reza

Mas Reza merupakan seseorang lulusan S-1 di Universitas Negeri Semarang yang sekarang menggeluti sebuah bisnis di bidang bakery di daerah BSB. Dari segi ekonomi dan life style dilihat luas rumah yang luas dan mempunyai beberapa mobil sudah dapat dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah. Dalam hal respons terhadap perubahan dan perilaku dalam berpolitik dapat dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai wawasan luas di bidang politik dari tanya jawab yang dilakukan bersama peneliti ketika melakukan wawancara.

#### 4. Mas Yudi

Mas Yudi merupakan seorang karyawan di bidang start up dan merupakan lulusan S-1 Universitas Negeri Semarang. Dari segi ekonomi dan life style dilihat dari rumah yang luas dan mempunyai sebuah mobil dapat dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah. Dalam hal

respons terhadap perubahan dan perilaku dalam berpolitik dapat dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai wawasan luas di bidang politik dari tanya jawab yang dilakukan bersama peneliti ketika melakukan wawancara.

#### 5. Ibu Ira

Ibu Ira merupakan seorang karyawan swasta yang bersama suaminya mempunyai bisnis di bidang percetakan. Dari segi ekonomi dan life style dilihat dari rumah yang luas dan mempunyai sebuah mobil SUV dan dua buah motor dapat dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah. Dalam hal respon terhadap perubahan dan perilaku dalam berpolitik dapat dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai wawasan luas di bidang politik dari tanya jawab yang dilakukan bersama peneliti ketika melakukan wawancara.

#### 6. Mas Bagus

Mas Bagus adalah seorang karyawan swasta dan mempunyai bisnis di bidang makanan dan merupakan lulusan S-1 Universitas Negeri Semarang. Dari segi ekonomi dan life style dapat dilihat dari rumah dan memiliki sebuah mobil dapat dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah. Dalam hal respon terhadap perubahan dan perilaku dalam berpolitik dapat dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai wawasan luas di bidang politik dari tanya jawab yang dilakukan bersama peneliti ketika melakukan wawancara.

#### 7. Ibu Budi

Ibu Budi seorang ibu rumah tangga yang mempunyai usaha bidang makanan. Dari segi ekonomi dan life style dilihat dari rumah yang dan mempunyai sebuah mobil dapat dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah. Dalam hal respon terhadap perubahan dan perilaku dalam berpolitik dapat dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai wawasan luas di bidang politik dari tanya jawab yang dilakukan bersama peneliti ketika melakukan wawancara.

#### 8. Mas Al

Mas Al merupakan seorang karyawan swasta. Dari segi ekonomi dan life style dapat dilihat dari rumah yang dan mempunyai sebuah mobil dapat dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah. Dalam hal respon terhadap perubahan dan perilaku dalam berpolitik dapat dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai wawasan luas di bidang politik dari tanya jawab yang dilakukan bersama peneliti ketika melakukan wawancara.

#### 9. Ibu Ninik

Ibu Ninik ialah seorang ibu rumah tangga. Punya bisnis bidang grosir baju. Dari segi ekonomi dan life style dilihat dari rumah yang luas dan mempunyai sebuah mobil dan dua motor dapat dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah. rumah yang dan mempunyai sebuah mobil dapat dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah. Dalam hal respon terhadap perubahan dan perilaku dalam berpolitik dapat dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai wawasan luas di bidang politik dari tanya jawab yang dilakukan bersama peneliti ketika melakukan wawancara.

Peneliti memilih masyarakat kelas menengah sebagai narasumber untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikarenakan, masyarakat pada umumnya memilih perbedaan perspeksi satu sama lain, baik golongan kelas atas, menengah maupun bawah. Dan dalam kehidupan social akan dicerminkan adanya perbedaan serta pengalaman pendidikan antara keluarga yang berada di kelas menengah keatas lebih tinggi juga memiliki persepsi bagus dibandingkan masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang baru tentang bagaimana masyarakat memaknai calon tunggal, peneliti menginginkan jawaban yang lebih ekspresif dan akademis dan memilih masyarakat kelas menengah di perumahan pondok ngaliyan asri sebagai narasumber penelitian.

## E. Kondisi Politik di Kota Semarang

Kehidupan politik saat ini berkembang dengan cepat. Indonesia sendiri juga sudah melalui sejumlah revolusi pada ideologi, organisasi politik, hingga demokrasi. Keadaan ini juga dijadikan sebagai alasan mengapa perlu pengembangan statistik politik yang berpatokan dengan 3 pilar utama. Pilar pertama yaitu masyarakat atau WNI yang terkait dengan hak pilih hingga keberagaman latar belakang. Pilar yang kedua yaitu partai politik yang ditinjau dari total, kantor cabang, pengurus, serta lainnya. Pilar ketiga yaitu pemilihan umum maupun daerah yang sudah dilakukan dengan memantau total perolehan suara, anggota legislatif, serta yang lainnya (Statika Ketahanan Sosial Kota Semarang 2016, 2017).

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai sejumlah anggota parpol serta peserta pemilu. Pasal 367 No. 17 Tahun 2012 tentang MPR, DPR, DPD, serta DPRD menjelaskan mengenai jumlah dari tiap anggota perwakilan rakyat tersebut. Anggota DPRD Kab/Kota mempunyai jumlah minimal 20 serta maksimal 50 orang. Anggota DPRD ini juga dipilih atas sejumlah proses seperti pendaftaran, kampanye, menyusun daftar pemilih, hingga pemilihan. Pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang, terdapat 6 daerah pemilihan untuk memilih calon anggota DPRD Kota Semarang yang bisa diamati dari tabel dibawah ini:

Tabel 3

Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kota Semarang

No.	Daerah Pemilihan	Kecamatan
1	Kota Semarang 1	Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur
2	Kota Semarang 2	Gayamsari, Pedurungan, Genuk
3	Kota Semarang 3	Candisari, Tembalang
4	Kota Semarang 4	Gajah Mungkur, Banyumanik, Gunung Pati
5	Kota Semarang 5	Mijen, Ngaliyan, Tugu

6	Kota Semarang 6	Semarang Selatan, Semarang Barat
---	-----------------	----------------------------------

Sumber : Website KPU Kota Semarang

Daerah pemilihan tersebut terdiri atas: Dapil 1 : Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Dapil 2 : Kecamatan Gayamsari, Pedurungan, Genuk. Untuk Dapil 3 : Kecamatan Candisari, Tembalang. Untuk Dapil 4 terdiri dari Gajah Mungkur, Banyumanik, Gunung Pati. Untuk Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Mijen, Ngaliyan, Tugu. Untuk Dapil 6 terdiri dari Kecamatan Semarang Selatan, Semarang Barat.

Tabel 4

Perolehan Kursi Tiap Partai Politik pada Pileg Kota Semarang Tahun 2019

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	PDI-P	19 Kursi
2.	PSI	2 Kursi
3.	NasDem	2 Kursi
4.	PKB	4 Kursi
5.	Demokrat	6 Kursi
6.	PAN	2 Kursi
7.	Golkar	3 Kursi
8.	Gerindra	6 Kursi
9.	PKS	6 Kursi

Sumber : Data Olah Peneliti

Berdasarkan Pileg Kota Semarang ditahun 2019, terdapat 9 parpol yang mempunyai kursi di DPRD serta terdiri atas: Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PSI.

Pada Pileg Kota Semarang tahun 2019, PDIP mempunyai kursi anggota paling banyak, yaitu 19 kursi. Adapun jumlah anggota ini juga meningkat dari Pileg Kota Semarang ditahun sebelumnya. Peningkatan total kursi ini juga disebabkan adanya sosok solid layaknya Jokowi yang mempunyai elektabilitas tinggi serta meningkatkan elektabilitas dari parpol.

Pada Pemilihan Umum 2019, jumlah partisipasi masyarakat Kota Semarang meningkat mencapai 80%, hal ini mengalami peningkatan dibanding gelaran Pilgub Jawa Tengah beberapa waktu sebelumnya, yang mana jumlah partisipasi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah jumlah partisipasi masyarakat Kota Semarang hanya sekitar 70%. Hal ini diungkapkan Sekda Kota Semarang yang dilansir dalam merdeka.com bahwasanya cara yang bisa dilakukan agar dapat meningkatkan suara yaitu mendorong ASN agar memotivasi masyarakat untuk memakai hak pilihnya. Cara ini dilakukan agar dapat menurunkan angka golongan putih serta menaikkan jumlah partisipasi masyarakat.

#### **F. Gambaran Khusus Calon Tunggal di Kota Semarang**

Pilkada serentak sudah dimulai sejak tahun 2005 sesuai UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, masyarakat akan memilih kepala daerah secara langsung, yang dimana sebelumnya juga memilih anggota DPRD. Pilkada ini bisa diikuti oleh masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Adapun sistem pemilihan akan dilaksanakan dengan memilih kepala daerah bersamaan wakilnya, yang terdiri atas setingkat gubernur (wilayah provinsi) dan bupati atau walikota (wilayah kabupaten atau kota).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) pertama kali di Kota Semarang berlangsung pada tanggal 26 Juni 2005, yang mana ini juga pengalaman pertama dari masyarakat Kota Semarang untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Walikota Semarang pada periode sebelumnya dipilih secara langsung oleh DPRD Kota Semarang. Pada pemilihan Walikota tahun 2000, Sukawi Sutarip memiliki pasangan Muchatiff Adisubrata serta berhasil mendapat 22 suara dari total 25 anggota DPRD Kota Semarang, sehingga bisa dilantik menjadi Walikota Semarang.

Sejak pilkada di Kota Semarang dipilih langsung oleh warga Kota Semarang yaitu sejak tahun 2005 hingga tahun 2015, dalam pemilihan kepala daerah tersebut selalu terdapat beberapa kandidat yang akan

memperebutkan jabatan untuk mengisi posisi walikota dan wakil walikota Semarang. Namun, suatu fenomena baru telah terjadi pada saat berlangsungnya pilkada serentak di Kota Semarang tahun 2020, yakni dimana saat itu hanya terdapat satu kandidat saja melawan kotak kosong. Berikut ini beberapa nama kandidat selama pilkada di Kota Semarang berlangsung:

Tabel 5

Jumlah Kandidat Pilkada Langsung di Kota Semarang

Tahun	Jumlah Kandidat	Nama Kandidat
2005	4 Kandidat	1. Sukawi Sutarip Muchatiff Adisubrata
		2. Soediro Atmo Prawiro Ahmad Musyafir
		3. Soendoro R. Yuwanto
		4. Bambang Raya Siti Chomsiyati
2010	5 Kandidat	1. Mahfudz Ali Anis Nugroho
		2. Harini Krisniati Ari Purbono
		3. Bambang Raya Kristanto
		4. M. Farchan Dasih Ardiyantari
		5. Soemarmo Hendrar Prihadi
2015	3 Kandidat	1. Soemarmo Zuber Safawi
		2. Hendrar Prihadi Hevearita Gunaryanti. R
		3. Sigit Ibnugroho Agus Sutyoso
2020	1 Kandidat	1. Hendrar Prihadi 2. Hevearita Gunaryanti. R

Sumber : Data Olah Peneliti

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada saat berlangsungnya pilkada serentak dari tahun 2005-2015 selalu terdapat beberapa kandidat untuk mencalonkan diri sebagai Walikota serta Wakil Walikota Semarang. Pada 2005, penyelenggaraan pilkada yaitu tanggal 26 Juni 2005 yang meliputi 4 calon. Nomor urut 1, pasangan Sukawi Sutarip serta Mahfudz Ali diusung oleh PAN, PKB, juga PPP. Nomor urut 2, Soediro Atmo Prawiro dan Ahmad Musyafir diusung oleh partai Demokrat. Kemudian, nomor urut 3, pasangan Soendoro dan R. Yuwanto yang diusung PDIP. Serta nomor urut 4, Bambang Raya dan Siti Chomsiyati yang diusung oleh Partai Golkar dan PDS. 4 pasangan tersebut harus mendapatkan suara dari total suara yang diperkirakan sebanyak 999.693. angka partisipasi pilkada Kota Semarang hanya mencapai 66,51% (664.897 orang) yang bersedia data ke TPS. Setelah pemungutan selesai, nomor urut 1 Sukawi Sutarip-Mahfudz Ali berhasil memenangkan pilkada Kota Semarang dengan meraup 468.003 suara atau setara 70,83% dari total yang masuk ke KPU Kota Semarang.

Lalu pada 18 April 2010, masyarakat Kota Semarang kembali memanfaatkan hak pilih mereka agar dapat memilih calok kepala daerah untuk periode 2010-2015. Ada total 5 pasangan yang harus mendapatkan partisipasi suara dari 1.100.078 orang yang sudah terdaftar mempunyai hak pilih. Pasangan nomor urut 1, yakni Mahfudz Ali dan Anis Nugroho yang diusung oleh Partai Demokrat. Pasangan nomor urut 2, Harini Krisniati dan Ari Purbono yang diusung oleh PKS dan Gerindra. Pasangan nomor urut 3, Bambang Raya dan Kristanto yang disusung Partai Golkar dan Parpol nonparlemen. Pasangan nomor urut 4, M. Farchan dan Dasih Ardiyantri yang diusung oelh PAN, PKB serta PPP. Dan terakhir, pasangan nomor urut 5, Soemarmo dan Hendrar Prihadi yang diusung oleh PDIP. Pada 23 April 2010, KPU Kota Semarang sudah menginformasikan ketetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan keputusan KPU Kota Semarang Nomor 25/Kpts/KPUKota-012.329521/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 yang mengesahkan Soemarmo-

Hendi sebagai Walikota dan Walikota Semarang dengan mendapatkan total 211.323 suara atau setara dengan 34,28%.

Pada 9 Desember 2015, untuk ketiga kalinya masyarakat Kota Semarang menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerahnya sendiri dalam Pilkada Kota Semarang periode 2015-2020. Untuk Pilkada Kota Semarang Tahun 2015, terdapat tiga pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Soemarmo dan Zuber Safawi yang diusung oleh PKB dan PKS. Pasangan nomor urut 2, Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu yang diusung oleh PDIP, Nasdem serta Partai Demokrat. Lalu pasangan nomor urut 3, Sigit Ibnugroho dan Agus Sutyooso yang diusung

Partai Gerindra, PAN, dan Partai Golkar. Ketiga pasangan calon ini memperebutkan sebanyak 1.109.045 suara pemilih. Sesudah pilkada selesai, pasangan calon walikota nomor 2 Hendi-Ita berhasil memenangkan Pilkada Kota Semarang dengan meraup 320.237 (46,36%) dari total suara yang masuk ke KPU Kota Semarang. Lalu diposisi kedua ada calon walikota dengan nomer urut 1 Soemarmo-Zuber Safawi dengan 220.745 suara. Dan diposisi ketiga ditempati pasangan nomor urut 3 Sigit Ibnugroho-Agus Sutysoso dengan perolehan suara 149.712 atau setara dengan 21,68%.

Pada pilkada serentak di Kota Semarang tahun 2020, suatu fenomena baru telah terjadi dimana pada saat berlangsungnya pilkada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 hanya terdapat satu pasangan calon saja yang mencalonkan pada pilkada tahun 2020, atau yang kita ketahui dengan istilah “calon tunggal”. Fenomena calon tunggal ini pertama kali terjadi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015, dan seakan-akan menjadi tren karena selalu menaiki kenaikan setiap tahunnya. Dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2020, Hendi-Ita sebagai calon petahana tidak memiliki lawan atau kandidat lain, yang mana pada akhirnya melawan kotak kosong.

Pasangan ini diusung oleh 9 partai politik yakni PDIP, PKS, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, Golkar, PSI, Nasdem, PAN, serta 5 partai non parlemen yakni Partai Hanura, PKPI, PBB, Partai Berkarya, PPP, dan Partai Gelora. Dari hasil rekapitulasi, KPU Kota Semarang menyatakan Hendi-Ita

memenangkan pilkada Kota Semarang Tahun 2020 dengan memperoleh 418.490 suara atau setara dengan 91,5% dari 1.174.068 suara pemilih.

## **BAB IV**

### **FAKTOR PENGARUH TINGGINYA ANGKA PARTISIPASI PEMILIH DI PILKADA KOTA SEMARANG TAHUN 2020**

#### **A. Peran KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 merupakan tonggak sejarah kepersertaan Kota Semarang dalam Pilkada bersamaan/serentak yang pelaksanaannya jatuh di tanggal 9 Desember 2020 bersama dengan 260 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam Laporan KPU Kota Semarang yang dimaksud serentak adalah karena dimulai bersama-sama, dilaksanakan semua tahapan bersama-sama dan diakhiri bersama-sama pula dan tidak ada yang saling mendahului satu provinsi/kabupaten/kota dengan yang lainnya.

Dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik, salah satu cara yang KPU Kota Semarang tempuh ialah melalui penggelaran kegiatan sosialisasi pada publik atau masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Semarang adalah sosialisasi mengenai Pemilihan Umum (Pemilu), mengingat ranah KPU sendiri adalah penyelenggara pemilu. Dasar normative dari adanya kegiatan sosialisasi pemilu adalah Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota.

Untuk menjaga kualitas penyelenggaraan dan juga upaya peningkatan partisipasi masyarakat perlu dipersiapkan sebaik mungkin dan dilakukan menyesuaikan dengan tahap-tahap yang sebelumnya sudah disepakati serta dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat secara masif. Kegiatan sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan karena dari sosialisasi seluruh informasi tahapan terkait penyelenggaraan pemilihan walikota & wakil walikota

Semarang di tahun 2020 bisa tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang. Sebagai penyelenggara pemilihan tentunya tahapan sosialisasi dilakukan tidak sederhana akan tetapi KPU Kota Semarang telah secara masif melaksanakan kegiatan sosialisasi. Harapannya adalah tidak melihat siapa yang terpilih akan tetapi lebih kepada tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah yang akan memimpin Kota Semarang selama 5 (lima) tahun kedepan, serta harapan lainnya agar presentase peningkatan partisipasi masyarakat mengalami peningkatan dari pilkada tahun 2015.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Semarang Tahun 2020 telah terjadi dua fenomena baru yang tidak pernah terjadi pada pilkada sebelumnya, yaitu fenomena calon tunggal serta fenomena pandemi covid-19. Namun, dengan adanya dua fenomena ini tidak lantas menurunkan semangat masyarakat Kota Semarang untuk memilih calon kepala daerahnya. Justru, pada Pilkada di Kota Semarang tahun 2020 telah terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dari pilkada tahun-tahun sebelumnya. Yang mana pada pilkada sebelumnya yaitu pilkada tahun 2005 presentase partisipasi pemilih hanya 66,68% dengan 4 kandidat, lalu pada pilkada tahun 2020 justru mengalami penurunan menjadi 60,06% padahal pada tahun 2010 calon kandidat bertambah menjadi 5 kandidat, kemudian pada pilkada tahun 2015 angka partisipasi pemilih 65,43% dengan 3 kandidat, kemudian pada pilkada tahun 2020 terjadi puncak peningkatan partisipasi masyarakat selama pagelaran pilkada langsung yaitu mencapai 68,3% hanya dengan satu pasangan calon saja.

Peningkatan partisipasi masyarakat pada pilkada di Kota Semarang tahun 2020 merupakan imbas dari usaha keras yang dilakukan KPU Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya guna meningkatkan partisipasi masyarakat ketika akan berlangsungnya pemilihan kepala daerah di Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Komisariss KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM Ibu Novi Maria Ulfah, Pendidikan Pemilih, serta hasil Laporan

Sosialisasi KPU Kota Semarang Tahun 2020. Ibu Novi mengungkapkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Semarang dibagi menjadi dua tipe, yakni sosialisasi yang dilakukan secara konvensional atau tatap muka dan sosialisasi yang dilakukan secara virtual atau tidak langsung.

#### 1. Sosialisasi Secara Konvensional (Luring)

Dari hasil Laporan Kelompok Kerja Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis dalam Pemilihan Walikota juga Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. KPU Kota Semarang mengawali sosialisasi dengan melakukan kegiatan berupa Launching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 yang dilakukan dengan kolaborasi dengan TKVU serta dengan langsung disiarkan di tanggal 13 November 2019 bertempat di Ruang Balaikota Pemerintah Kota Semarang yang mana kegiatan ini dihadiri oleh Muspida beserta seluruh Jajaran Kepala SKPD/Badan/ Dinas, Camat, Lurah.

Selanjutnya KPU Kota Semarang melakukan kegiatan Road Show Sosialisasi, dalam road show ini dilakukan pada 16 kecamatan yang didalamnya hadir semua lurah di area kerja kecamatan tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Novi Maria Ulfah selaku Komisaris Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, ia menjelaskan :

“KPU Kota Semarang pada tahun 2020 mengadakan kegiatan road show mba di 16 kecamatan. Dari 16 kecamatan ini nantinya kita akan memilih kelurahan mana saja yang masuk kriteria angka partisipasi masyarakatnya yang paling rendah. Jadi setiap kecamatan ada 7 sampai 10 kelurahan dicari yang paling rendah angka partisipasinya kemudian kita datang untuk kita adakan kegiatan sosialisasi”. *(Wawancara dengan Komisaris Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, pada tanggal 12 April 2022 pukul 12.00 WIB di Kantor KPU Kota Semarang)*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan Ibu Novi selaras dengan hasil laporan sosialisasi KPU Kota Semarang tahun 2020.

KPU kota Semarang lalu mengadakan kegiatan sosialisasi bersama dengan LSM serta Ormas pada tanggal 28 Juli 2020 yang mengundang PD Muhammadiyah, Komunitas Umat Budha, PGKS, KNPI, PP FKPPi, Karang Taruna, GOW, PC, IMI, NU, WKRI, PHD, MATAKIN. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Poncowati Hotel Patra Semarang. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2020 KPU kembali mengadakan kegiatan sosialisasi perihal undangan kepada DPC Lindu Aji, Majelis Tafsir Al Quran, Pengurus Cabang Fatayat NU, Pimpinan Daerah Aisyiah, Gerakan Nasional anti Narkoba, Pimpinan Dewan Masjid, Pimpinan Daerah LDII, Media Informasi, Pengurus IDI, Komunitas Lari, Dewan Kesenian, Ikatan Remaja Masjid, Komunitas Hysteria, Rumah Sepeda Indonesia, Gerakan Pesona Indonesia, Kantor Grab Driver, DPC Legiun Veteran, Pattiro Semarang, PGRI yang tujuannya menosialisasikan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi publik dalam pilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 yang berlokasi di Ruangan Rapat KPU Kota Semarang Semarang, dengan Narasumber dari Komisioner KPU Kota Semarang Ibu Novi Maria Ulfah dan Bapak Henry Casandra Gultom. Hal ini selaras dengan apa yang telah disampaikan Ibu Novi dalam wawancara, ia menyampaikan :

“Berbicara angka partisipasi tidak hanya KPU saja mba tetapi juga semua stakeholder juga selalu diajak baik itu dari pemerintah maupun LSM. Kemarin saat kita mengadakan sosialisasi kami menggandeng 40 LSM dan Ormas di Kota Semarang untuk kita minta mereka menghadirkan anggotanya sebanyak 100 orang untuk melakukan sosialisasi. LSM yang dimaksud dalam hal ini berbasis kota baik level keagamaan. Kepemudaan, KNPI, NU, dan lain sebagainya semuanya kita gandeng”. (*Wawancara dengan*

*Komisaris Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, pada tanggal 12 April 2022 pukul 12.00 WIB di Kantor KPU Kota Semarang)*

Selain itu KPU Kota Semarang juga membuat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pemula dengan target utama yaitu pelajar dengan mengambil tema sosialisasi KPU Goes to School. Kegiatan sosialisasi ini perdana dilaksanakan di SMAN 1 Semarang pada tanggal 3 Maret 2020. Dalam kegiatan ini mengundang siswa-siswi SMAN 1 Semarang, SMKN 4 Semarang, SMA 17 Agustus Semarang, SMK Ibu Kartini Semarang, SMK Mataram Semarang, SMKN 8 Semarang dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 66 orang. Selanjutnya KPU Goes to School mendatangi SMAN 3 Semarang pada tanggal 10 Maret 2020 dihadiri oleh siswa-siswi SMAN 3 Semarang itu sendiri dengan jumlah peserta 100 orang. Dan terakhir KPU Goes to School mendatangi SMAN 2 Semarang pada 12 Maret 2020 dengan dihadiri siswa-siswi SMAN 2 Semarang sendiri dengan jumlah peserta 100 orang.

Hal lainnya yang tidak dilupakan KPU Kota Semarang adalah mengadakan kegiatan sosialisasi bersama dengan kelompok penyandang disabilitas yang diadakan pada tanggal 14 Agustus 2020 perihal undangan kepada Founder Komunitas Sejiwa Kota Semarang, Ketua Gerkatina, Ketua Pertuni, Ketua HIMIKS yang bertempat di Ruang Astoria Ballroom Lantai M Hotel Dafam Semarang.

## 2. Sosialisasi Secara Tidak Langsung (Virtual)

Mengingat pada Pilkada Tahun 2020 Indonesia sedang dilanda pandemi covid-19, oleh sebab itu KPU Kota Semarang tidak hanya melakukan sosialisasi secara langsung, namun juga membuat sesuatu alternatif baru yakni melakukan kegiatan sosialisasi secara tidak langsung. KPU Kota Semarang turut memanfaatkan perkembangan internet untuk melaksanakan proses sosialisasi yakni KPU *On Air* serta ILM dan Bibir Ayu dengan menggunakan platform Youtube. Selain itu terdapat beberapa upaya sosialisasi lainnya yang dilakukan KPU Kota

Semarang secara tidak langsung atau virtual. Hal itu sesuai yang diungkapkan Ibu Novi Maria Ulfah yang merupakan Komisararis KPU Kota Semarang divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, ia mengungkapkan :

“Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi secara masif selain kita melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat, kita juga memanfaatkan media social yang ada mba, seperti facebook, twitter instagram, juga youtube, kita memanfaatkan semua platform yang ada. Yah harapannya karena media social saat ini digandrungi anak muda, dari situlah kita bisa melakukan sosialisasi dengan menyadarkan anak muda bahwa betapa pentingnya pemilu. Selain itu, kita juga aktif di official website KPU Kota Semarang mba, kita sering update kegiatan yang kpu lakukan. Lalu kita aktif melakukan kerjasama dengan radio yang ada di Kota Semarang untuk melakukan sosialisasi yakni KPU On Air. Dan yang tidak lupa, kami mempunyai chanel youtube resmi kpu mba, disana kita mempunyai dua konten yakni ILM dan Bibir Ayu, di dua konten tersebut kami melakukan sosialisasi terkait pilwakot tahun 2020”. (*Wawancara dengan Komisararis Divisi Pendidikan Pemilih, Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM, pada tanggal 12 April 2022 pukul 12.00 WIB di Kantor KPU Kota Semarang*)

Dari wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa KPU Kota Semarang juga secara masif melakukan sosialisasi dengan media social seperti Instagram (@kpukotasemarang), Facebook (KPU Kota Semarang, Twitter (@kpukotasemarang), dan Youtube (KPU Kota Semarang). Tidak hanya melalui media social yang ada, KPU Kota Semarang juga melakukan sosialisasi melalui laman yang dimilikinyakni di <https://kpu-semarangkota.go.id>. Pelaksanaan sosialisasi melalui media social dan website yang dimiliki KPU Kota Semarang dilakukan karena berkembang pesatnya pengguna internet, khususnya daerah Kota Semarang. Sasaran dalam sosialisasi yang dilakukan

melalui website dan media social ini bertujuan untuk menyasar warga internet (*netizen*). Selain dengan memanfaatkan social media dan laman website, KPU Kota Semarang juga melakukan sosialisasi melalui media social elektronik yakni siaran melalui Radio rentang waktu sejak bulan Juli 2020 hingga November 2020.

Selain memanfaatkan media social yang seperti disebutkan sebelumnya, KPU Kota Semarang mengerjakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di 16 kecamatan sejak tanggal 28 Oktober 2020-19 November 2020 dengan memanfaatkan platform Zoom yaitu mengadakan kegiatan webinar dengan beberapa tema webinar yaitu: Penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, Arti Penting Partisipasi Pemilih dalam Pilwakot Semarang 2020, dan Kontribusi Warga Semarang dalam Pilwakot 2020. Dan dari adanya webinar mengenai sosialisasi ini, KPU Kota Semarang mengharapkan tetap mengadakan kegiatan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat yang ada di Kota Semarang meskipun tidak bisa langsung terjun langsung ke masyarakat.

Selain itu dari hasil Laporan Kelompok Kerja Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, KPU Kota Semarang juga melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara yang menarik perhatian masyarakat yakni: Virtual Road Bike, Musik Sore Hore, pertunjukan Wayang Kulit, penggelaran Konser Virtual Election FestKontempore. Keempat kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui akun media social youtube maupun instagram Kota Semarang dengan adanya kegiatan ini sebagai sarana mensosialisasi pilwakot pada 9 Desember 2020.

Tidak hanya itu saja, KPU Kota Semarang mensosialisasikan pilwakot tahun 2020 dengan cara menarik lainnya yaitu mengadakan kegiatan Lomba Vlog serta Lomba Cover Theme Song TPH. KPU mengadakan kompetisi vlog dengan tema “Vlog Competition KPU

Kota Semarang”, kompetisi itu diharapkan mampu memancing keinginan dan meningkatkan partisipasi dan juga membentuk keyakinan publik mengenai keterjaminan keamanan dalam memakai hak suara mereka dalam pilkada 9 Desember 2020. Sedangkan lomba cover theme song TPH merupakan lomba cover jingle tentukan pilihan hati, lomba ini juga diharapkan akan menarik minat juga keyakinan publik mengenai keterjaminan keamanan dalam memakai hak suara dalam pilwakot mendatang. Kedua lomba ini tidak ada pemungutan biaya, dan terdapat hadiah untuk pemenang kedua lomba tersebut.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya KPU Kota Semarang telah melaksanakan perannya guna mengescalasi peran aktif politik masyarakat dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi politik secara masif publik ditengah pandemi covid-19. Sasaran KPU Kota Semarang dalam melakukan sosialisasi adalah seluruh lapisan masyarakat yang memiliki hak suara di dalam Pilkada Tahun 2020. Sasaran masyarakat yang dimaksud adalah pemilih pemula. pemilih berbasis keluarga, pemilih berbasis komunitas, pemilih berbasis agama, partai politik, media massa, para disabilitas, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, LSM serta kelompok marjinal. Selain itu, KPU Kota Semarang juga turut aktif melakukan sosialisasi kepada warga internet (*netizen*) melalui media social serta laman website KPU Kota Semarang.

## **B. Peran Tim Sukses dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Pada masa banyak partai seperti saat ini, tim sukses ialah marketing dalam berpolitik yang kehadirannya sangat krusial dan sangat dibutuhkan. Timses ini tidak hanya bermanfaat bagi partai yang baru bertumbuh atau berskala kecil yang mana sangat butuh dukungan dalam mempromosikan atau menaikkan popularitasnya di tengah-tengah masyarakat. Lebih dari itu

timses juga sangat dibutuhkan berbagai partai besar yang sejak dahulu sudah mapan dan diketahui eksistensinya (Maulana, 2016).

Timses ialah sebuah tim yang kandidat, partaipol dan koalisi bentuk guna manajemen, membuat rumusan serta rancangan strategi memenangkan kandidatnya di dalam pemilu. Timses ialah salah satu hal yang sangat mempengaruhi dalam hal mendapatkan dukungan yang maksimal. Timses yang hebat akan mampu memberikan pengaruh pada akumulasi suara yang didapat kandidat yang didukungnya (Yuniarti, 2010). Tim sukses bertujuan melakukan upaya-upaya pemenangan calon yang diusung di daerah pemilihan yang mana dalam kegiatan kampanye politik juga nantinya diperlukan manajemen yang rapi sehingga tujuan pemenangan dapat dicapai.

Pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Kota Semarang, Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu ialah pasangan calon tunggal tanpa lawan memenangkan pemilihan walikota dengan meraup suara kemenangan mencapai 418.490 atau setara dengan 91,56% dari 1.174.068 suara pemilih. Kemenangan ini tak lepas dari ikut serta dan upaya keras tim sukses dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan kegiatan kampanye ketika akan berlangsungnya pemilihan kepala daerah di Kota Semarang. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama ketua DPC (Dewan Perwakilan Cabang) PDI Perjuangan Kota Semarang, ia mengungkapkan upaya apa saja yang dilakukan untuk memenangkan pasangan calon yang mereka usung. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan PDIP serta tim sukses untuk memenangkan pasangan calon Hendi-Ita :

#### 1. Konsolidasi dan Koordinasi Yang Baik

Perencanaan ialah langkah terpenting dalam mencapai sebuah tujuan. Koordinasi dan konsolidasi dilaksanakan sebagai bentuk pemeliharaan dan penetapan hal-hal yang sudah dicapai, mengembangkan hal-hal yang tengan dilaksanaka serta antisipasi segala hal yang dimasa depan dimungkinkan terjadi. Hal itu dilaksanakan sebagai upaya memperkuat organisasi serta menguatkan keberadaan

organisasi di tengah-tengah publik (Waty, 2019). Konsolidasi dan koordinasi diantara partai serta timses ialah hal yang tak lepas baik yang bersifat internal maupun eksternal. Konsolidasi dan koordinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan PDIP Kota Semarang serta tim sukses dalam memenangkan pasangan calon yang mereka usung yakni Hendi-Ita. Dua hal ini diyakini sebagai penyebab perolehan suara pasangan calon Hendi-Ita mengalami peningkatan yang sangat luar biasa meskipun pada saat berlangsungnya Pilkada Tahun 2020 pasangan calon Hendi-Ita ialah calon tunggal yang mana nantinya akan melawan kotak kosong. Selain itu konsolidasi dan koordinasi dibagi menjadi dua bagian, yang pertama konsolidasi dan koordinasi di lingkup internal dan konsolidasi dan koordinasi di lingkup eksternal.

#### 1. Konsolidasi dan Koordinasi di Lingkup Internal

Dalam lingkup internal, konsolidasi dan koordinasi dilakukan diantara para jajaran partai PDIP Kota Semarang. Membangun hubungan yang solid diantara jajaran partai memicu kemenangan pasangan calon yang partai usung yakni pasangancalon tunggal Hendi-Ita. Hal ini diungkap langsung oleh Bapak Untung selaku Ketua DPC PDIP Kota Semarang, ia menjelaskan :

“Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 terjadi konsolidasi dan koordinasi yang baik diantara para pendukung Hendi-Ita. Jajaran PDIP sangat solid membuat kami yakin dengan kondisi yang solid ini kami yakin menang. Pada awalnya target kami tidak mencapai 91%, target awal kami hanya 85%, lalu diakibatkan jajaran kami yang sangat solid kami percaya diri bahwa target kami akan melampaui 85% baru setelah itu kami menaikkan menjadi 90%”. *(Wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kota Semarang, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 11.00 WIB di Kantor DPC PDIP Kota Semarang)*

Hal ini diyakinkan ketika ia menjelaskan bahwa konsolidasi dan koordinasi di lingkup internal yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kemenangan calon pasangan yang diusung, tanpa ada hubungan yang solid diantara setiap jajaran partai mustahil memenangkan pemilihan, hal ini dibuktikan dalam lanjutan dalam penjelasan Bapak Untung ketika wawancara, ia memaparkan :

“Bukti perlunya konsolidasi dan koordinasi di lingkup internal adalah terjadi pada pemilihan kepala daerah periode tahun 2005 mba. Dimana pada periode tahun 2005, PDIP mempunyai calon tetapi jajaran PDIP sendiri tidak solid baik itu pengurus tingkat cabang (kecamatan), tingkat pengurus ranting (kelurahan), maupun anak ranting (RW) tidak solid. Hal ini menyebabkan pada saat berlangsung pilkada tersebut, calon kami berada di urutan terakhir. Namun, begitu jajaran partai kami solid seperti pada pemilihan kepala daerah tahun 2010 PDIP bisa memunculkan kembali pasangan calon lalu meraih kemenangan begitu juga seterusnya sampai pada pilkada saat ini”. (*Wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kota Semarang, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 11.00 WIB di Kantor DPC PDIP Kota Semarang*)

Dari pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya tanpa ada konsolidasi dan koordinasi yang baik diantara lingkup internal yakni jajaran partai sendiri akan sulit dapat memenangkan pemilihan, hal ini diibaratkan menjadi pilar utama untuk mengokohkan pondasi.

Konsolidasi dan koordinasi di lingkup internal yang dilaksanakan PDIP sebagai partai yang mengusung calon Hendi-Ita yang pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2020 pasangan ini menjadi pasangan calon tunggal tanpa ada lawan ataupun kandidat yakni menggunakan setiap media dan momen untuk

mensosialisasikan serta mengukuhkan citra kandidat. Dalam hal ini dapat dilihat dari karakteristik personal kandidat, Hendi-Ita dicitrakan orang yang bersih, ramah, gaul dengan masyarakat Kota Semarang. Selain itu, Hendi-Ita dicitrakan sebagai figure yang telah berpengalaman memimpin Kota Semarang dapat dilihat dari penghargaan-penghargaan serta pencapaian yang pasangan calon ini capai selama memimpin Kota Semarang.

Konsolidasi dan koordinasi di lingkup internal partai juga dilakukan para jajaran partai adalah dengan berkoordinasi dengan intensif dengan DPP serta DPC PDIP melalui bantuan kepada masyarakat. Hal ini diutarakan langsung oleh ketua DPC PDIP Kota Semarang :

“Ditengah kampanye yang dilakukan pada saat pandemi covid-19 kami segenap jajaran partai secara sukarela memberikab bantuan kepada waga terdampak covid-19 dengan membagikan beras lalu handsanitizer dan lain sebagainya”. (*Wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kota Semarang, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 11.00 WIB di Kantor DPC PDIP Kota Semarang*)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jajaran partai PDIP maupun tim sukses gencar melakukan berbagai jenis pendekatan dengan masyarakat diantaranya secara sukarela memberikan bantuan yang mana nantinya hal ini diharapkan membawa respon baik dari publik dan dengan tidak langsung dapat menjadikan citra pasangan calon yang diusung semakin baik.

## 2. Konsolidasi dan Koordinasi di Lingkup Eksternal

Konsolidasi dan koordinasi tidak hanya dilakukan dalam lingkup internal yaitu jajaran partai politik pengusung saja melainkan juga dilakukan pada lingkup eksternal. Dalam lingkup eksternal, konsolidasi dan koordinasi melibatkan jajaran partai politik baik partai politik pengusung maupun pendukung, organisasi

sayap partai, aktivis-aktivis LSM, akademisi, wartawan, relawan pendukung, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Selain membangun hubungan yang solid diantara jajaran partai, membangun hubungan solid diantara partai pendukung, pengusung, serta para relawan dinilai menjadi pemicu kemenangan pasangan calon Hendi-Ita pada pilkada yang secara serentak di tahun 2020 di Kota Semarang. Hal ini disampaikan dalam wawancara bersama Bapak Untung selaku Ketua DPC PDIP Kota Semarang, ia menjelaskan :

“Selain membangun hubungan yang solid diantara jajaran partai, kami juga melakukan konsolidasi serta koordinasi bersama pihak eksternal yakni partai pengusung, pendukung, serta para relawan. Dalam hal ini, relawan datang darimana saja mba termasuk dari kalangan tokoh-tokoh agama. Mulai dari kalangan Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah serta ormas-ormas lain seperti jajaran Katholik, Kristiani, Hindu, Budha serta Konghucu. Akibat dari dukungan ini, pasangan calon Hendi-Ita mendapatkan perolehan yang sangat luar biasa”. (*Wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kota Semarang, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 11.00 WIB di Kantor DPC PDIP Kota Semarang*)

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa memang terbukti untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya membangun hubungan yang solid diantara para jajaran partai saja melainkan perlu dibarengi dengan membangun hubungan yang baik dengan para relawan.

Pihak PDIP selaku partai serta tim sukses melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak eksternal melalui mobilisasi massa melalui segmentasi. Segmentasi sendiri merupakan pengelompokkan para pemilih (*voters*) sesuai kriteria yang terdapat di masyarakat. Pengelompokkan para pemilih ataupun segmentasi

bisa dilihat dengan memakai berbagai pendekatan, yaitu: social-budaya, geografi, demografi, perilaku, psikografi, serta sebab-akibat (Firmanzah, 2008). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua DPC PDIP Kota Semarang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mobilisasi massa yang dilakukan melalui segmentasi oleh para jajaran partai dan tim sukses adalah dengan karakteristik social budaya, yaitu dengan melakukan pendekatan dengan beberapa tokoh agama atau kelompok agama seperti jajaran Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Katholik, Kristiani, Hindu, Budha, serta jajaran Konghucu. Melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama dinilai akan mencerminkan citra pasangan calon Hendi-Ita yang dapat merangkul setiap pemeluk agama yang ada di Kota Semarang.

## 2. Track Record

Untuk memilih seorang pemimpin baik itu pemimpin negara ataupun pemimpin kepala daerah begitu penting untuk mempertimbangkan *background* kehidupan seorang figur pemimpin. Sehingga kita sebagai masyarakat mempunyai kriteria didalam memilih bakal pemimpin. *Track record* seorang individu sangat krusial untuk ditelaah sehingga kita bisa mengetahui eksistensi yang sebenarnya dari seorang bakal pemimpin ini. Masa lalu seseorang yang semakin baik. Baik dalam hal bekerja, hubungan dengan orang sekitarnya, pada dunia bisnis, dengan keluarganya, maupu jejak pengabdian terhadap masyarakat maka hal tersebut bisa menjadi bahan penentu dalam memutuskan memilih pemimpin. (Joni Hermanto; Annisa Purwatiningsih; Muhamad Rifa'i, 2020).

Pasangan calon tunggal Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang Tahun 2020 yakni Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu dinilai mempunyai figure serta track record yang baik. Hal tersebut diungkap langsung oleh Ketua DPC PDIP Kota Semarang, beliau mengutarakan :

“Track record dari calon kami sangat luar biasa mba. Masyarakat Kota Semarang sendiri menilai kinerja Hendi, masyarakat melihat bahwa Hendi-Ita kerjanya luar biasa. Tidak hanya banyak tampil di media, melainkan Pak Hendi dengan melakukan kerja nyata dan kerja nyata tersebut dibuktikan beliau. Track recordnya bagus sehingga seluruh jajaran lapisan masyarakat mau datang ke TPS untuk memberikan dukungan. Bahkan diluar dugaan lingkup internal mba, kami khawatir sebelumnya dengan beberapa golongan masyarakat seperti sebagai contoh masyarakat yang bertempat tinggal di perumahan elite Purianjasmoro kemudian masyarakat yang tinggal di wilayah Pecinan awalnya susah sekali menggerakkan massa disana, namun pada saat berlangsungnya pemilihan mereka mau datang ke TPS untuk mencoblos. Jadi peningkatan jumlah pemilih juga dibarengin perolehan suara yang baik. Disamping konsolidasi dan koordinasi berjalan dengan baik di internal maupun eksternal juga track record dari calon kami benar-benar luar biasa sehingga masyarakat mau memberi dukungan. Dapat dilihat dari perkembangan Kota Semarang ketika Hendi menjabat. Karena calon kami mempunyai elektabilitas serta aksesibilitas, hal seperti inilah yang akan dicintai masyarakatnya”. (*Wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kota Semarang, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 11.00 WIB di Kantor DPC PDIP Kota Semarang*)

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Bapak Untung selaku Ketua DPC PDIP Kota Semarang memang terbukti dari capaian-capaian yang dicapai Hendi-Ita. Prestasi yang dimiliki calon ini memang terbukti dengan kerja nyata yang dilakukan untuk memajukan perkembangan Kota Semarang. Karier politik Hendi sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014, Ketua KNPI Jawa Tengah, lalu terpilih sebagai Wakil Walikota Kota Semarang Tahun 2010, lalu pada 2013 ia dilantik sebagai Walikota Kota Semarang sebagai ganti Soemarmo HS yang

dipecat karena terduga korupsi. Kemudian terpilih kembali pada Pilkada Tahun 2015 lalu mencalonkan kembali pada Pilkada Tahun 2020. Sedangkan karier politik Ita adalah sebagai politikus PDIP Perjuangan yang kemudian terpilih sebagai Wakil Walikota Kota Semarang Tahun 2015, lalu bersama Hendi mencalonkan kembali sebagai Wakil Walikota Pilkada tahun 2020.

Kinerja pasangan calon ini dibuktikan selama mereka menjabat, mulai dari membenahi infrastruktu hingga birokrasi. Di sektor infrastruktur seperti memulai pembetonan jalan, program banjir kanal, membangun fly over, membangun instalator PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), merevitalisasi Kota Lama serta memiliki target pada tahun 2020 yakni Semarang menjadi wilayah yang bebas dari kekumuhan serta menyediakan fasilitas publik yakni, air siap minum. Tidak cuma di sektor infrastruktur saja, pada sektor pariwisata pemerintah juga melaunching bis pariwisata “si Kunciung” yang tujuannya adalah menaikkan kuantitas kunjungan para wisatawan asing di Kota Semarang. Dan kinerja lainnya di bidang reformasi birokrasi serta di bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, tingginya presentase kemenangan pasangan calon tunggal Hendi-Ita tidak lain merupakan keberhasilan tim sukses dalam melaksanakan tugasnya dan dari hal inilah dinilai mempunyai korelasi terhadap peningkatan jumlah ikut serta pemilih di Pilkada Tahun 2020 di Kota Semarang. Gencarnya tim sukses dalam melakukan kampanye membuat pasangan calon Hendi-Ita memenangkan pemilihan. Namun, kemenangan pasangan calon tunggal ini juga diakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap sosok Hendi-Ita. Pengalaman menjabat sebagai walikota dan wakil walikota Kota Semarang, kinerja dan bukti kerja nyata serta minimnya catatan-catatan buruk dimasa lampau juga menjadi preferensi bagi pemilih dan hal inilah yang membuat masyarakat memilih calon tersebut dan berharap pasangan calon ini menjabat kembali sebagai walikota dan

wakil walikota Kota Semarang. Meskipun pada saat Pilkada tahun 2020 Indonesia sedang mengalami bencana covid-19, namun dari hasil presentase kemenangan calon tunggal ini menjadi bukti bahwa masyarakat antusias untuk datang ke TPS dan memilih serta mencoblos pasangan calon Hendi-Ita.

### 3. Hambatan Tim Sukses ditengah Pandemi COVID-19

Besar dampak Covid-19 bagi pol hidup masyarakat. Hambatan ini dirasakan oleh hampir semua negara yang ada di dunia. Termasuk Indonesia, pandemi telah membawa dampak hebat bagi keseharianhidup masyarakat, berbagai aturan seperti kewajiban taat protokol kesehatan, pembatasan sosial (PSBB), larangan berkerumun serta berbagai pengaturan lainnya memunculkan beragam masalah. Sehingga pandemi telah memunculkan efek ganda tidak hanya di bidang kesehatan tetapi juga pendidikan, sosial, ekonomi, serta politik (Febriana Andiani Putri; Raihan Dwipriandi, 2021).

Satu permasalahan di sector perpolitikan yang terpengaruh pandemi ialah adalah penyelenggaraan Pilkada. Pelaksanaan pilkada tahun 2020 merupakan pilkada pertama yang dilakukan ditengah situasi darurat yakni adanya bencana non alam covid-19. Kondisi ini menimbulkan terjadinya perdebatan mengenai dilaksanakannya pilkada ditengah wabah. Banyak pihak yang merasa pesimi menyelenggarakan pilkada karena khawatir akan bermunculan kluster baru. Tetapi, lewat Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan bahwa dilakukannya penundaan pilkada sampai Desember tahun 2020 yang menjadi dasar bagi para pihak penyelenggara, peserta sampai dengan masyarakat bahwa pilkada tetap akan dilaksanakan ditengah wabah covid-19.

Pilkada tetap dilaksanakan dengan landasan bahwa jika pilkada ditunda lebih lama akan berpengaruh terhadap stabilitas politik di Indonesia. Pilkada dinilai sebagai salah satu kewajiban untuk memenuhi

salah satu bentuk dari asas negara demokrasi. Pilkada menjadi salah satu bentuk dari penguatan demokrasi karena terdapat kekuatan untuk mendorong masyarakat sipil terkait dengan akses, suara, dan control dalam pemerintahan, penguatan kebijakan, hingga adanya institusionalisasi dari ekonomi dan politik (Sahdan, 2008). Berdasarkan hal tersebut pemerintah memiliki tanggungjawab untuk tetap melaksanakan pilkada ditengah pandemi covid-19 untuk mendukung penguatan ekonomi politik.

Namun, pelaksanaan pilkada ditengah pandemi ini tentu menimbulkan berbagai hambatan dan tantangan didalamnya, hal ini tentunya akan berdampak pada tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada dan membuat beberapa tahapan tidak dapat dilaksanakan secara normal. Salah satunya adalah larangan kerumunan orang banyak pada saat kampanye, sementara hal ini berbeda dengan euphoria pelaksanaan kampanye yang notabene membutuhkan partisipasi dari banyak orang. Jika sebelumnya kampanye politik pada saat pilkada identic dengan iring-iringan massa, orasi ditengah keramaian, hingga melaksanakan acara besar-besaran, kini tidak lagi.

Pihak KPU sebagai penyelenggara menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi Covid-19. Pada peraturan ini berisikan dengan kampanye dalam bentuk seperti apa yang dibolehkan di tengah wabah. Salah satu pilihan kampanye dapat dilakukan agar dapat terhindar dari kerumunan masyarakat ialah melalui berkampanye dengan virtual. Kampanye tersebut dilaksanakan dengan cara online dalam jaringan (daring) maupun memakai platform sosial media sebagai sarana penyampaian visi misi dan juga nenpromosikan para calon. Dilansir dari Kompas.com tercatat 270 daerah yang akan melaksanakan proses pilkada yang rincian 9 provinsi, 37 kota, juga 224 kabupaten di Indonesia.

Pada tahun 2020 warga Kota Semarang akan melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam 5 tahun mendatang dengan hanya ada satu pasangan calon kandidat atau yang biasa kita ketahui dengan istilah calon tunggal. Hal ini ialah kali pertama masyarakat Kota Semarang memilih calon kepala daerahnya dengan hanya ada satu pasangan calon kandidat saja yang akan melawan kotak kosong. Pasangan calon walikota ini merupakan petahana, yaitu walikota serta wakilnya Hendrar Prihadi juga Hevearita Gunaryanti Rahayu. Pertarungan satu pasangan calon yang tanpa lawan mengindikasikan Pilkada Kota Semarang tahun ini akan berlangsung dengan cukup sengit, karena masyarakat Kota Semarang yang notabenehnya tidak pernah mengalami fenomena ini akankah ia memilih pemimpin yang sebelumnya menjabat sebagai walikota atau malah memilih kotak kosong.

Namun, adanya pandemi wabah covid-19 tentunya telah menyebabkan kendala pelaksanaan kampanye dengan *face to face* atau bertatap muka dikarenakan khawatir dapat memunculkan kluster yang baru. Hal ini pun yang dirasakan langsung oleh PDIP serta tim sukses pasangan calon Hendi-Ita, mereka menyadari kendala dan hambatan yang sangat besar pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2020. Hambatan dan kendala tersebut seperti apa yang disampaikan secara langsung oleh Bapak Untung selaku Ketua DPC PDIP Kota Semarang:

“Hambatan yang kami rasakan sebagai tim sukses Hendi-Ita pada saat pilkada tahun 2020 berlangsung sangat terasa mba daripada tahun-tahun sebelumnya pilkada langsung terjadi. Kampanye yang kita lakukan benar-benar dibatasi. Pada saat itu kampanye diluar tidak diperbolehkan harus dilingkup rumah dengan maksimal peserta hanya 50 orang saja dengan tetap menggunakan standar protocol kesehatan. Pihak bawaslu serta kepolisian juga sangat mengawasi hal tersebut, hal inilah yang menjadi kendala kami melakukan kampanye. Belum lagi perizinan tersebut harus

mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan serta pihak kepolisian, jika sudah mendapatkan perizinan baru pihak bawaslu memberikan kami izin untuk bisa melakukan kampanye dengan syarat tidak boleh melakukan kampanye terbuka”. (*Wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kota Semarang, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 11.00 WIB di Kantor DPC PDIP Kota Semarang*)

Sesuai pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pihak PDIP serta tim sukses mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 terkait dengan Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Pandemi Covid-19 sebagai dasar acuan teknis dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan kampanye. Pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Bab VI secara spesial mengatur tentang aktivitas kampanye para paslon kepala daerah. Sesuai yang disebutkan didalam Pasal 57 peraturan dijelaskan bahwa kampanye pilkada 2020 masih bisa dilaksanakan melalui mekanisme berikut : pertemuan secara terbatas, pertemuan secara tatap muka serta dialog, bahan kampanye tersebar kepada publik, debat public atau debat terbuka antarpasangan calon, pemasangan alat peraga, penayangan iklan kampanye lewat elektronik, media daring, dan media massa cetak; media social; aktivitas lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan.

Penayangan iklan kampanye melalui media massa elektronik, cetak, media social serta media online merupakan salah satu aktivitas kampanye yang dapat dilakukan ditengah-tengah wabah, dan kegiatan ini juga yang telah dilakukan oleh tim sukses pasangan calon Hendi-Ita. Seperti apa yang disampaikan Bapak Untung, ia mengatakan :

“Peran media sangat membantu kami dimasa pandemi covid-19 mba karena sangat sulit untuk melakukan kegiatan kampanye terbuka oleh karena itu kami alokasikan melalui media. Namun, kampanye melalui media juga terdapat waktu yang ditentukan mba yakni 10 hari sebelum kampanye berakhir baru diperbolehkan baik itu melalui media online ataupun cetak maupun media yang lainnya.

Penggunaan media juga sangat terbatas tidak seleluasa seperti yang biasa kami lakukan pada kampanye pilkada sebelum-sebelumnya”.  
(*Wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kota Semarang, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 11.00 WIB di Kantor DPC PDIP Kota Semarang*)

Dari pemaparan Bapak Untung selaku DPC PDIP Kota Semarang, dapat dipahami bahwa semua kegiatan kampanye sangat dibatasi. Hambatan ini tentu saja sangat berdampak, Namun hal ini dapat dipahami, bahwasanya pembatasan kampanye melalui media dibatasi agar tidak terjadinya *Black Campaign* atau yang biasa kita kenal dengan kampanye hitam.

Dalam melakukan perannya untuk memenangkan pasangan calon yang diusung, DPIIP serta tim sukses mengatakan bahwa cara yang paling efisien serta efektif untuk mereka melakukan kampanye adalah melakukan kampanye *door to door* serta melakukan kampanye daring via Zoom. Bapak Untung memaparkan :

“Sampai saat kegiatan kampanye berakhir kami selaku tim sukses menyimpulkan bahwa cara yang paling efektif untuk kita melakukan kampanye ditengah pandemi covid-19 yakni melakukan kampanye *door to door* dari rumah ke rumah lainnya mba serta melakukan kampanye melalui media Zoom. Kami mengumpulkan anak ranting untuk mengumpulkan warga dengan jumlah warga maksimal 50 orang saja, lalu kami melakukan kampanye”. (*Wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kota Semarang, pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 11.00 WIB di Kantor DPC PDIP Kota Semarang*)

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa cara paling efisien serta efektif melakukan kampanye di era pandemi adalah dengan melakukan kampanye *door to door* serta kampanye melalui media daring Zoom. Selain tidak membuat kerumunan yang nantinya dikhawatirkan menciptakan kluster baru namun cara ini juga dinilai menghemat waktu serta biaya. Dalam hal ini, hambatan yang dirasakan

selaku tim sukses Hendi-Ita ketika berlangsungnya kampanye memang nyata adanya. Namun pembatasan yang terjadi tidak membuat tim sukses untuk menyerah melakukan kegiatan kampanye untuk memenangkan calon mereka. Hal ini terbukti dari kemenangan calon tunggal Hendi-Ita pada Pilkada di Kota Semarang Tahun 2020 di Kota Semarang.

### **C. Peran Kesbangpol Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Badan Kesbangpol merupakan salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi pembantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan serangkaian rencana kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan mengenai kebangsaan, persatuan, pembaharuan dan penanganan konflik, peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara, pendidikan politik warga, peningkatan kerukunan umat beragama, serta pemberdayaan organisasi sosial dan politik. Dalam merumuskan dan menentukan program, Kesbangpol sendiri memiliki indikator yang menjadi standar rencana kerja dan kebutuhan pelayanan masyarakat, yaitu mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut ini terdapat dua sumbangsih yang dilakukan oleh Badan Kasbangpol Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ketika PILAKADA 2020:

#### **1. Bantuan Dana Pada Pengurus Partai Politik.**

Badan Kasbangpol Kota Semarang memberikan kontribusi kepada Partai Politik berupa pemberian Dana. Pemberian dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan program sosialisasi guna meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk memakai hak pilihnya dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2020. Hal ini berangkat

dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ridho Divisi Politik Dalam Negeri, beliau memaparkan:

“Badan Kasbangpol sendiri memberikan bantuan uang kepada Partai Politik agar bisa secara mandiri untuk memberikan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Partai Politik mendapatkan uang sebesar Rp.5000/suara yang sah”. (*Wawancara dengan divisi politik dalam negeri pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 13:02 WIB di Kantor Kasbangpol Kota Semarang*)

Pemberian bantuan dana tersebut kepada Partai Politik yang mengusung Hendi-Ita sebanyak 9 Parpol. Kesembilan Parpol tersebut seperti PDI-P, PAN, PSI, Golkar, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PKS, dan PKB. Dari kesembilan partai politik tersebut mereka membuat program sosialisasi secara mandiri kepada warga masyarakat Kota Semarang yang dimana sumber dananya dari Badan Kasbangpol. Tujuan pemberian bantuan dana ini guna Partai Politik juga ikut terlibat dalam meningkatkan angka pemilih pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2020. Pemberian bantuan dana tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Kasbangpol Kota Semarang terhadap Partai Politik yang dimana kedua organisasi mempunyai peranan penting dalam berjalannya proses demokrasi di Indonesia.

## 2. Sosialisasi dan Pendidikan Politik.

Proses kegiatan sosialisasi politik dan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Kesbangpol merupakan salah satu metode pemerintah untuk memberikan sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami hak, kewajiban serta tanggung jawab yang harus dimiliki setiap warganya. Pendidikan dan sosialisasi politik yang diselenggarakan oleh Kesbangpol disajikan dalam berbagai bentuk seperti seminar, pelatihan, dialog publik, serta berbagai inovasi baru yang dikeluarkan oleh Kesbangpol seperti kemah pemuda. Pembahasan lebih dalam mengenai pendidikan politik dan sosialisasi politik yang

dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang berangkat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ridho Divisi Politik Dalam Negeri, beliau memaparkan:

“Kasbangpol Kota Semarang sendiri melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Program tersebut dibuat guna meningkatkan partisipasi warga masyarakat. Program tersebut dilaksanakan per Dapil yaitu 2 keluarahan”.  
*(Wawancara dengan divisi politik dalam negeri pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 13:02 WIB di Kantor Kasbangpol Kota Semarang)*

Berangkat dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa Kasbangpol Kota Semarang mempunyai kontribusi dalam meningkatkan angka partisipasi penyalur hak pilih meningkat. sebanyak 68,3% yang dimana tahun sebelumnya hanya menyentuh angka 65,43%. Dalam melaksanakan program tersebut Kasbangpol menggandeng Akademisi, Ketua Bawaslu, DPRD Komisi A untuk menyukseskan program tersebut. Pada lapisan masyarakat sendiri Kasbangpol juga menggandeng tokoh adat, agama, dan pemuda yang berada pada wilayah tempat tinggal sekitarnya. Hal tersebut dimaksudkan informasi mengenai pilkada dapat tersebar dan tersampaikan dengan akurat. Maka dari itu setiap program yang diagendakan selalu berorientasi pada keberlangsungan demokrasi yang baik.

## BAB V

### SIKAP DAN RESPON MASYARAKAT MEMAKNAI CALON TUNGGAL

#### A. Fenomena Calon Tunggal dan Pemaknaannya Oleh Masyarakat Kelas Menengah

##### 1. Sikap Masyarakat Kelas Menengah Terhadap Pelaksanaan Pilkada Dengan Pasangan Calon Tunggal

Sikap diibaratkan sebagai komponen perasaan, yang mana perasaan pendukung juga pemihak atau penolak suatu objek. Definisi sikap juga sebagai kepercayaan, iindakan, opini, juga perhatian menyangkut jasa. Sederhananya, sikap ialah ekspresi dari suka atau tidak mendukung atau monolak terhadap suatu objek tertentu (Na'Imah, 2019), serta bila dihubungkan kajian ini maka sikap ialah perasaan masyarakat kelas menengah sebagai narasumber dalam memaknai adanya fenomena calon tunggal yang terjadi pada saat berlangsungnya pilkada di Kota Semarang pada tahun 2020.

Fenomena calon tunggal yang baru pertama kali terjadi selama pagelaran pemilihan kepala daerah langsung di Kota Semarang yaitu pada tahun 2020 menuai sikap dan respon yang beragam. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat kelas menengah di perumahan pondok ngalihan asri, data yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat kelas menengah menyikapi calon tunggal yang terjadi pada pilkada tahun 2020 dengan dua sikap yaitu pro atau mendukung dan tidak mempermasalahkan adanya calon tunggal dan terdapat juga yang kontra atau menolak keras adanya calon tunggal.

Masyarakat kelas menengah yang ada di perumahan pondok ngalihan asri yang tidak mempermasalahkan adanya calon tunggal pada saat pilkada tahun 2020 dikarenakan mereka merasa bahwa Hendi-Ita sebagai calon tunggal mempunyai elektabilitas dan hasil kerja yang nyata hal utama inilah yang tidak dipermasalahkan oleh masyarakat

kelas menengah dengan adanya calon tunggal, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad ia menyampaikan pendapatnya seperti ini:

“Kalau ditanya apakah saya mendukung adanya calon tunggal pada pilwakot Kota Semarang kemarin jawabannya iya, karena saya merasa bahwa Hendi-Ita sebagai calon tunggal selama menjabat sebelumnya pemerintahannya relative bagus mulai dari pembangunan, ekonominya dan lain-lain. Meskipun rakyat menghendaki adanya beberapa calon, namun kinerja Hendi-Ita bagus otomatis pesaing lain akan mengundurkan diri dengan sendirinya. Saya rasa itu menjadi wajar, walaupun muncul calon tunggal yang akan beradu dengan kotak kosong tapi masyarakat Kota Semarang menganggap calon tunggal tersebut kurang baik maka saya kira yang menang akan tetap kotak kosong”. (*Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 22Maret 2022 pukul 18.30 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri*)Hal serupa disampaikan oleh Ibu Ninik, ia menyampaikan:

“Untuk saya pribadi mba saya tidak mempermasalahakan adanya calon tunggal yang terjadi pada pemilihan kepala daerah kemarin saya setuju saja kan itu semua sudah dari atasan atau partai-partai lain yang hampir semua mendukung calon tunggal ini, kalau kita sih sebagai masyarakat hanya ikut saja. Toh pak Hendi dan Ibu Ita program-programnya selama mereka menjabat sudah bagus sudah bisa dilihat Kota Semarang semakin cantik untuk dipandang, jadi saya mendukung saja, ikut mensukseskan. Kalaupun misalnya memang ada calon tunggal, tapi saya belum tau kinerjanya, kalau ini kan sudah jelas sudah 10 tahun menjabat sudah kelihatan hasilnya. Kalau calon tunggal yang saya tidak ketahui hasil kerjanya pasti saya otomatis akan memilih kotak kosong”. (*Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 13.30 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri*)

Hal lainnya yang selaras disampaikan oleh masyarakat kelas menengah, yaitu narasumber Ibu Ira, ia menyampaikan:

“Saya sebagai masyarakat yang merasakan hasil kerja Hendi-Ita selama mereka menjabat sebagai walikota dan wakil walikota Semarang jelas tidak mempermasalahkan adanya calon tunggal yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2020, tetapi bukan tandanya saya mendukung terjadinya calon tunggal tetep saya menginginkan adanya beberapa kandidat tapi kan kinerja mereka sudah jelas, saya rasa masyarakat Kota Semarang bisa dengan bijaksana menentukan pilihannya untuk memilih pemimpinnya, kalau dirasa adanya calon tunggal tapi hasil kerjanya gaada masyarakat saya rasa akan otomatis masyarakat akan memilih kotak kosong”. (*Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 17 April 2022 pukul 14.00 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri*)

Hal senada turut disampaikan oleh narasumber Pak Soepriyadi yang tidak mempermasalahkan adanya calon tunggal, ia mengutarakan:

“Kalau membicarakan calon tunggal, mungkin bagi masyarakat Kota Semarang pada saat menjelang pilkada tahun 2020 kemarin mungkin suatu hal yang baru karena kan biasanya pada saat pemilihan walikota jelas terdapat beberapa kandidat lho ko ini cuma ada dua kandidat saja ditambah kandidat satunya kosong. Bagi saya sendiri mba saya tidak mempermasalahkan adanya calon tunggal dengan catatan bahwa calon tunggal ini memang jelas babat bibit bobotnya. Kalau Hendi-Ita kan memang jelas mereka sudah menjabat sebelumnya dan selama mereka menjabat kemajuan yang dirasakan masyarakat jelas adanya, track record mereka berdua juga bagus. Kecuali ketika saya dihadapkan dengan calon tunggal tapi saya tidak tau kinerjanya secara otomatis saya akan memilih kotak kosong”. (*Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada*

*tanggal 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri)*

Dari keempat narasumber diatas yang telah menyampaikan pendapatnya, penulis dapat menyimpulkan, bahwa masyarakat kelas menengah yang ada di perumahan pondok ngaliyan asri mendukung adanya calon tunggal pada pilkada tahun 2020 di Kota Semarang karena mereka mengetahui dan merasakan hasil kerja calon tunggal tersebut yang dimana mereka telah menjabat sebagai walikota dan wakil walikota Semarang sebelumnya tetapi bukan serta merta mereka tidak tau dampaknya calon tunggal ini jika terus terjadi, mereka memilih calon tunggal tersebut dengan catatan mereka tau hasil kerjanya kalau mereka tidak tau secara otomatis mereka akan memilih kotak kosong yang mana jika mayoritas masyarakat Kota Semarang memilih kotak kosong otomatis calon tunggal tersebut nantinya tidak akan memenangi pemilihan kepala daerah.

Seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya, Ketika dihadapkan pada suatu situasi atau suatu fenomena akan terdapat dua tipe masyarakat ada yang mendukung suatu objek ada pula yang tidak mendukung atau menolak keras karena berbagai alasan. Begitu juga dengan masyarakat kelas menengah yang ada di perumahan pondok ngaliyan asri, ketika diwawancarai mengenai adanya calon tunggal yang terjadi pada pilkada tahun 2020 terdapat masyarakat yang menolak adanya calon tunggal seperti apa yang disampaikan oleh narasumber Mas Reza, ia mengungkapkan pendapatnya menolak adanya calon tunggal karena:

“Sebenarnya saya memilih kotak kosong pada pemilihan kepala daerah kemarin cuma sebagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan saya saja sama pihak penyelenggara pilkada toh lagian juga gaada ngaruhnya tetep kepilih juga calon tunggal tersebut. Disini saya tekankan ya mba, saya memilih kotak kosong bukan karena saya meragukan kinerja calon tunggal tersebut, saya

juga merasakan kemajuan Kota Semarang selama mereka menjabat, disini cuma sebagai bentuk ketidakpuasan aja kepada penyelenggaranya bukan kepada kandidat calon tunggalnya. Ditambah saya merasa kecewa karena pilkada tahun 2020 kemarin seakan-akan dilaksanakan seperti dipaksakan, jadi itu semua tergantung kepada penguasanya bukan kepada kita suara rakyat”.  
*(Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 19.30 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri)*  
Hal serupa seperti disampaikan narasumber Mas Bagus, ia menyampaikan:

“Saya datang ke TPS pada saat berlangsungnya pilkada tahun 2020, namun saya memilih kotak kosong karena yang saya rasakan sebenarnya pilkada yang dilaksanakan kemarin percuma, kalau cuma ada calon tunggal kenapa harus ada pemilihan toh gaada lawannya juga untuk dipilih. Meskipun ada kotak kosong, namun kan masyarakat belum tentu semuanya memahami calon tunggal itu apa yang pada akhirnya ya memilih kandidat yang satu itu. Menurut saya mengadakan pilkada dengan calon tunggal hanya buang-buang uang negara saja.” *(Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 16.30 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri)*

Terdapat juga masyarakat kelas menengah di perumahan ngaliyan asri yang tidak datang ke TPS sebagai bentuk kekecewaan, seperti yang disampaikan mas Yudi, ia mengungkapkan:

”Saya sendiri tidak datang ke TPS mba pada saat pilkada tahun 2020 kemarin, alasannya yakan cuma ada satu kandidat saja dan kalau ada satu kandidat saja otomatis masyarakat Kota Semarang akan memilih calon tunggal tersebut. Dan alasan lainnya, saya kan sebagai masyarakat muda yang aktif menggunakan media social saya mengetahui bahwa adanya calon tunggal ini mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Saya tidak datang ke TPS sebagai bentuk

kekecewaan mba dan menghindari calon tunggal ini terpilih tapi pada akhirnya terpilih juga dengan presentase kemenangan tinggi lagi. Saya harap kasus calon tunggal ini tidak terus dibiarkan mba harus ada follow up ketegasan dari pihak yang berwenang mengurus hal seperti ini. Kalau dibiarkan saja calon tunggal ini terus terjadi, ditakutkan fenomena ini dianggap wajar dan pada akhirnya daerah lain akan mengikuti dan dapat dipastikan parpol akan mengalami disfungsi yang seharusnya menghasilkan kandidat kandidat yang berkompeten malah tidak". (*Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 19.00 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri*)

Dari ketiga hasil wawancara peneliti dengan masyarakat kelas menengah di perumahan poondok ngaliyan asri, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat yang lebih bersikap kontra atau menolak keras adanya calon tunggal adalah mereka yang berusia dibawah 30 tahun yang mana masyarakat yang dapat dikatakan lebih melek akan perpolitikan yang terjadi di Indonesia dan lebih aktif menggunakan social media. Mereka memilih calon tunggal sebagai bentuk kekecewaan dan menolak jika calon tunggal ini terjadi lagi pada pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kota Semarang, mereka tetap mengharapkan jika penyelenggara lebih mengedepankan suara rakyat yang tetap menginginkan adanya beberapa kandidat untuk mereka lebih bisa memilih pilihan terbaik bagi mereka. Hal ini merujuk dari makna demokrasi itu sendiri bahwa suatu demokrasi akan lebih substansial bila terdapat jaminan bagi rakyat untuk haknya memilih dan dipilih yaitu terdapat beberapa kandidat tidak hanya ada satu yakni calon tunggal.

## 2. Menghitung Dari Pemanfaatan Atau Preferensi Dalam Pemilihan Sebagai Suatu Bentuk Tindakan

Di dalam teori pilihan rasional dikatakan bahwa kemunculan rasionalitas ialah saat dihadapkan oleh banyaknya ketersediaan pilihan di depan mata yang mana nantinya bebas dalam penentuannya. Disebut

rasional bila tujuan pengambilan pilihan tersebut guna memaksimalkan kebutuhan baik segi sikap atau tindakan. Di dijelaskan pula bahwa manusia ialah organisasi pengedepan diri sendiri, jadi segala perhitungan dikerjakan guna keuntungan bertambahserta kerugian berkurang. Jadi acuannya ialah tindakan itu mengapa dikerjakan juga tentunya dari tindakan tersebut terkandung kegunaan yang mampu masyarakat terima.

Dari pemaparan mengenai teori pilihan rasional diatas, peneliti menemukan bahwa kajian mengenai kejadian fenomena calon tunggal di Kota Semarang pada pilkada tahun 2020 dapat dikaitkan dan dikupas menggunakan teori pilihan rasional. Bahwa masyarakat Kota Semarang pada saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah tahun 2020 dihadapkan oleh dua pilihan yakni antara masyarakat memilih calon tunggal atau pilihan lainnya masyarakat dapat memilih kotak kosong. Masing-masing pilihan ini tentu saja nantinya akan berdampak dan mempunyai keuntungan untuk masyarakat itu sendiri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan masyarakat kelas menengah di perumahan pondok ngaliyan asri, data yang ditemukan dilapangan adalah masyarakat kelas menengah lebih memilih calon tunggal dibandingkan memilih kotak kosong dikarenakan calon tunggal dinilai mempunyai keuntungan bagi masyarakat itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ira, ia lebih memilih calon tunggal dibandingkan kotak kosong karena ia merasa calon pasangan ini membawa keuntungan pribadi bagi suaminya, Ibu Iramenjelaskan:

“Kalau keuntungan bagi diri saya sendiri sih engga mba, cuma kalau untuk suami saya bisa dikatakan iya. Soalnya suami saya kan punya usaha jasa percetakan nah kalau lagi musim musim menjelang pilkada biasanya banyak partai-partai yang menggunakan jasa percetakan suami saya, termasuk partai pengusung calon tunggal ini. Jadi secara tidak langsung saya mendapatkan keuntungan dari calon

tunggal ini. Cuma ya saya memilih calon tunggal ini bukan hanya karena saya mendapatkan keuntungan dari partainya karena menggunakan jasa percetakan suami saya, tapi dilain sisi juga karena kinerjanya bagus banyaklah bukti kerja nyatanya. Kalaupun ada partai dari paslon yang menggunakan jasa suami saya tapi saya rasa dia engga punya kinerja yang bagus saya tetep ga pilih mba tetep harus objektif bagi saya untuk memilih calon pemimpin”.  
*(Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 17 April 2022 pukul 14.00 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri)*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa narasumber Ibu Ira memilih pasangan calon tunggal daripada kotak kosong pada saat pilkada tahun 2020 di Kota Semarang selain karena Hendi-Ita mempunyai kinerja yang bagus tetapi juga paslon tunggal ini membawa keuntungan bagi suaminya otomatis untuk dirinya juga. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Ahmad dan Ibu Ninik, ia memilih pasangan calon tunggal dikarenakan mereka merasa bahwa paslon tunggal ini yaitu Hendi-Ita selama menjabat sebagai walikota dan wakil walikota mempunyai hasil kerja salah satunya membantu mengembangkan UMKM yang ada di Kota Semarang termasuk UMKM milik Pak Ahmad dan juga Ibu Ninik. Hal ini dijelaskan oleh Pak Ahmad dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya memilih pasangan Hendi-Ita pada pilkada tahun 2020 karena saya merasakan sendiri hasil-hasil kerja yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya oleh karena itu saya memilih mereka kembali untuk menjabat sebagai walikota dan wakil walikota tahun 2020. Salah satu hasil kerja mereka yang saya rasakan mereka bisa mengembangkan UMKM yang ada di Kota Semarang mba termasuk usaha yang saya miliki yaitu usaha franchise. Mereka memberi kesempatan untuk masyarakat Kota Semarang untuk lebih menunjukkan eksistensinya melalui usaha yang dimiliki”.

*(Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 18.30 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri)*

Hal ini juga seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ninik, ia memaparkan:

“Kalau membicarakan keuntungan yang saya dapatkan karena memilih pak Hendi memang bisa dikatakan iya mba. Namun saya memilih beliau bukan karena semata-mata ia memberikan saya keuntungan tapi karena saya tau hasil kerja apa saja yang ia lakukan sampai membuat Kota Semarang semakin cantik untuk dilihat. Bukan hanya sampai itu saja, Pak Hendi dan Ibu Ita juga memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya salah satunya dengan mengembangkan usaha menengah kebawah yang ada di Kota Semarang. Salah satunya yang mendapatkan kesempatan itu saya sendiri mba, saya bisa mengembangkan usaha grosir baju yang saya lakukan”. *(Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 13.30 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri)*

Dari hasil penjelasan diatas Pak Ahmad dan Ibu Ninik memilih pasangan calon tunggal Hendi-Ita dikarenakan selama menjabat sebagai walikota dan wakil walikota Semarang mereka mampu memakmurkan serta mensejahterakan rakyatnya melalui hasil kerjanya yaitu memberikan kesempatan untuk masyarakat Kota Semarang untuk mengembangkan UMKM yang dimiliki. Dari ketiga narasumber tersebut diketahui mereka memilih paslon tunggal dibandingkan kotak kosong dikarenakan pasangan calon tunggal ini membawa keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri dan secara otomatis pilihan rasionalnya akan memilih sesuatu hal yang dirasa dapat memaksimalkan keuntungannya. Selain membawa keuntungan pribadi, data yang ditemukan di lapangan oleh peneliti menemukan bahwa masyarakat kelas menengah di perumahan pondok ngaliyan asri memilih calon tunggal dibandingkan kotak kosong karena pasangan calon tunggal ini

dirasa membawa keuntungan bagi masyarakat banyak yaitu memajukan Kota Semarang. Seperti yang disampaikan narasumber Pa Soepriyadi ia mengungkapkan bahwa alasan utama ia memilih pasangan calon tunggal Hendi-Ita dibandingkan kotak kosong karena hasil kerja yang mereka capai, ia menjelaskan:

“Kalau ditanya keuntungan pribadi yang saya dapatkan dari memilih pasangan calon tunggal ini tentu saja tidak ada mba karena pekerjaan saya lakukan tidak ada sama sekali kaitannya dengan hal ini. Cuma kalau keuntungan yang dirasakan orang banyak yaitu masyarakat Kota Semarang tentu saja ada mba. Pasti masyarakat Kota Semarang merasakan bagaimana Kota Semarang selama Pak Hendi menjabat mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Mulai dari segi infrastruktur, ekonomi dan lain sebagainya. Saya rasa dengan memilih pasangan ini kembali pada pilkada tahun 2020 udah jawaban paling tepat mba yang saya rasakan”. (*Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri*)

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Ibu Budi dari hasil wawancara ia menyampaikan:

“Bagi saya sendiri, mendapatkan keuntungan pribadi selama pemilihan kepala daerah tidak pernah merasakan, namun efek yang saya rasakan sendiri selama Pak Hendi menjabat sebagai walikota dalam kurun waktu bisa dikatakan 3 periode yakni kemajuan dari Kota Semarang itu sendiri. Kemajuan dari Kota Semarang secara tidak langsung membawa keuntungan bagi semua lapisan masyarakat yang ada di Kota Semarang mba menurut saya. Sebagai contoh, Hendi-Ita melakukan kemajuan di sector pariwisata hal ini secara tidak langsung dapat mendatangkan wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Tentu saja dari kemajuan ini dapat membawa keuntungan bagi masyarakat yang mempunyai usaha disekitar tempat wisata tersebut. (*Wawancara dengan*

*Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 16.00 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri)*

Dari apa yang disampaikan kelima narasumber diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mengapa masyarakat kelas menengah di perumahan pondok ngaliyan asri lebih memilih pasangan calon tunggal dibandingkan memilih kotak kosong adalah dikarenakan mereka merasa lebih mendapatkan keuntungan dari calon tunggal tersebut baik keuntungan pribadi maupun keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Seperti dalam teori pilihan rasional atas pemikiran James S. Coleman, bahwa masyarakat kelas menengah disini sendiri diibaratkan menjadi aktor, dengan anggapan individu yang mempunyai tujuan dalam menentukan suatu pilihan bernilai dasar yang dipakai untuk penentuan pilihan atas pertimbangan mendalam berdasarkan kesadaran. Aktor pula memiliki power sebagai upayanya menentukan pilihan yang dimau.. Aktor atau masyarakat kelas menengah sendiri menjadi kunci terpenting dalam mengerjakan sebuah pilihan atau tindakan. Dikarenakan dalam melaksanakan sebuah pilihan, masyarakat kelas menengah sebagai aktor akan berusaha mencapai dan memaksimalkan kepentingannya dengan pengambilan atau pemilihan sebuah pilihan yang dianggap membawa hasil terpenting dalam mewujudkan kepentingannya. Dalam hal ini masyarakat kelas menengah jelas memilih pasangan calon tunggal sebagai pilihannya karena dirasa jauh lebih menguntungkan daripada ia memilih kotak kosong yang tidak berdampak dan membawa keuntungan pribadi maupun kepentingan bersama, secara naluri masyarakat kelas menengah memilih pilihan tersebut karena aktor mampu mengetahui dirinya sendiri dan apa yang ia mau dan ia pantas terima pastinya sebelumnya telah mempertimbangkan serta memikirkan dulukeputusan tersebut hingga akhirnya menjadi sebuah pandangan keputusan sangat rasional.

## **B. Harapan Masyarakat Untuk Pilkada Kota Semarang**

Pemilihan kepala daerah langsung yang digelar secara serentak telah dilaksanakan Kota Semarang sejak tahun 2005, dan terjadi setiap kurun waktu 5 (lima) tahun sekali. Pilkada serentak tahun 2020 merupakan salah satu pilkada yang dapat dikatakan cukup berbeda selama pagelaran pilkada langsung terjadi. Hal ini dikarenakan, pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2020 pilkada secara langsung digelar ditengah situasi puncak bencana non alam covid-19 terjadi, termasuk Kota Semarang. Pilkada di Kota Semarang mengalami dua fenomena yang tidak pernah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Semarang sebelumnya, yakni pilkada yang diadakan disaat pandemi covid-19 dan fenomena calon tunggal yang terjadi pada pilkada tahun 2020.

Peristiwa calon tunggal ini baru pertama kali dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Semarang selama pilkada langsung terjadi. Hal tersebut menimbulkan respon yang beragam dari masing-masing masyarakat. Ada yang tidak mempermasalahkan adanya calon tunggal itu sendiri, ada yang menolak keras pilkada dengan calon tunggal, atau bahkan ada yang tidak memahami makna dari calon tunggal itu sendiri bagaimana. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil yang ditemukan di lapangan adalah bahwasanya terdapat beberapa harapan yang diharapkan oleh masyarakat kelas menengah untuk pilkada Kota Semarang selanjutnya, yaitu pilkada periode 2025 dan periode seterusnya. Meskipun dari hasil penelitian, 8 dari ke 11 sample masyarakat kelas menengah di perumahan Pondok Ngaliyan Asri tidak mempermasalahkan adanya calon tunggal pada pilkada tahun 2020 dikarenakan calon tunggal tersebut dinilai mempunyai kinerja yang bagus dan bukti kerja nyatanya, namun tidak dapat dihindarkan bahwa masyarakat kelas menengah tersebut untuk pilkada Kota Semarang selanjutnya mengharapkan terdapat beberapa kandidat tidak hanya satu kandidat saja. Seperti yang disampaikan narasumber Ibu Ani, ia mengatakan:

“Maunya seperti pilkada sebelumnya mba, yang tidak hanya ada satu kandidat saja karena kan harus ada pilihan, karena kalau cuma satu ya pasti secara tidak langsung akan memilih calon tersebut daripada memilih kotak kosong”. (*Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 20.00 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri*)

Hal serupa disampaikan oleh Pak Soperiyadi Ketika diwawancarai ia mengatakan:

“Ya pengennya ada beberapa kandidat tidak hanya ada satu kandidat saja mba. Kalau boleh saya ibaratkan seperti ketika saya mau membeli buah mangga, pasti kan saya membandingkan dengan beberapa buah manga lainnya, saya lihat luarnya dulu mana ya yang rasanya akan manis. Begitu juga ketika saya mau memilih calon kepala daerah, kan enak kalau ada beberapa kandidat, saya bisa melihat luarnya yaitu visi dan misi yang mereka punya”. (*Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 09.00 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri*)

Pernyataan dari masyarakat kelas menengah yang menginginkan ada beberapa kandidat juga diperjelas oleh narasumber Mas Al, ia mengutarakan pendapatnya yakni:

“Harapan yang saya harapkan sebenarnya cuma pengen pilkada Kota Semarang selanjutnya lebih mengusung demokrasi yang tidak hanya terdapat satu kandidat saja tetapi terdapat kandidat lainnya juga. Jadi kita sebagai masyarakat lebih bisa memilih, membandingkan visi dan misi serta program-program yang dimiliki oleh beberapa kandidat yang ada dan kemudian kita pilih mana yang lebih baik dan menurut versi kita terbaik”. (*Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 19.00 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri*)

Dari apa yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber diatas, masyarakat kelas menengah di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri

mengharapkan untuk terdapat beberapa kandidat untuk pilkada Kota Semarang kedepannya yang tidak hanya ada satu kandidat saja. Selain mengharapkan terdapat beberapa kandidat untuk pilkada Kota Semarang, masyarakat kelas menengah tersebut juga menginginkan untuk pilkada periode selanjutnya tetap mengedepankan demokrasi yang ada serta pilkada yang mengedepankan asas *luber jurdil*. Hal ini seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan masyarakat kelas menengah yaitu Ibu Ira, ia mengatakan:

“Harapan pilkada kedepannya yang terpenting sih mba menurut saya tetap dalam esensi demokrasi, hal tersebut tidak boleh hilang mba. Dan ketika calon kepala daerah tersebut memenangkan pemilihan dan jadi pemimpin tolong kepentingan-kepentingan kelompoknya harus dikesampingkan kalau perlu dihilangkan sepenuhnya, dan calon pemimpin tersebut harus mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakatnya dan hal tersebut kuncinya sih menurut saya”. (*Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 17 April 2022 pukul 14.00 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri*)

Harapan selanjutnya yang diharapkan oleh Pak Ahmad yang menginginkan untuk pilkada Kota Semarang mengedepankan asas *luber jurdil*, hal ini diperjelas beliau dalam wawancaranya, yakni:

“Pemilihan kepala daerah yang saya harapkan seharusnya yang seperti slogannya dulu yaitu pilkada yang mengedepankan jujur, adil dan sifatnya rahasia. Saya kira mudah-mudahan begitu, tapi yang saya melihat sendiri kayaknya ko sekarang mulai melenceng dari sifat tersebut. Harapannya masyarakat tetap optimis suatu saat akan terjadi demokrasi yang berasaskan *luber dan jurdil* tidak ada ancaman-ancaman dari pihak manapun”. (*Wawancara dengan Masyarakat Kelas Menengah, pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 18.30 WIB di Perumahan Pondok Ngaliyan Asri*)

Dari hasil pemaparan wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya harapan utama yang diharapkan oleh masyarakat kelas menengah di perumahan pondok ngaliyan asri untuk pemilihan kepala daerah periode selanjutnya di Kota Semarang adalah mereka tidak menginginkan adanya calon tunggal lagi dan menginginkan terdapat beberapa kandidat yang akan bisa mereka bandingkan untuk mencari versi terbaik menurut mereka. Selain hal tersebut, masyarakat kelas menengah di perumahan pondok ngaliyan asri mengharapakan untuk pilkada periode selanjutnya untuk tetap mengedepankan pilkada yang mengedepankan asas demokrasi yakni luber dan jurdil tanpa ada paksaan didalamnya. Dan hal lainnya tidak terlupe masyarakat menginginkan pemilihan kepala daerah di Kota Semarang yang dapat menghasilkan pemimpin yang tidak hanya mementingkan dirinya dan kelompok kepentingannya namun lebih mengedepankan kepentingan rakyatnya. Bagaimanapun juga, maju dan mundurnya pembangunan serta ekonomi di suatu daerah tergantung kualitas dan kesungguhan pemimpinnya dalam membangun daerahnya. Menghasilkan kepala daerah yang berkualitas juga tergantung pada moralitas dan kecerdasan nurani pemilihnya. Pemilih yang cerdas akan memilih calon pemimpin daerahnya tidak hanya sekedar melakukan kewajibannya sebagai warga daerah saja. Namun pemilih yang cerdas dapat memilih secara tanggungjawab, yaitu calon pemimpin tersebut akan dipilih setelah diperhitungkan dengan matang dan seksama, serta diyakini dapat membawa kemajuan, kemaslahatan serta kesejahteraan bagi daerahnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data temuan yang telah dikumpulkan dan dibahas pada penelitian ini mengenai Fenomena Calon Tunggal Pilkada Serentak Tahun 2020 (Studi Kasus Pilkada di Kota Semarang Tahun 2020), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditengah pandemi covid-19 dan fenomena calon tunggal yang terjadi pertama kali dalam pagelaran pilkada serentak di Kota Semarang justru terdapat peningkatan partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan KPU Kota Semarang maupun tim sukses dari pasangan Hendi-Ita melakukansosialisasi maupun kampanye secara massive guna meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melakukan dua tipe sosialisasi yakni sosialisasi yang dilakukan secara konvensional maupun daring. Sedangkan tim sukses pengusung Hendi-Ita yakni PDIP meningkatkan partisipasi masyarakat melalui konsolidasi dan koordinasi yang baik mulai dari lingkup internal yaitu jajaran PDIP sendiri maupun eksternal yaitu partai pendukung dan pengusung, aktivis-aktivis LSM, organisasi sayap partai, relawan pendukung, akademisi, wartawan, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Lalu pihak Kesbangpol Kota Semarang turut menciptakan peningkatan partisipasi masyarakat dengan melakukan dua tipe kegiatan yakni verifikasi bantuan partai politik dan sosialisasi pendidikan politik.
2. Sikap dan repon masyarakat kelas menengah di perumahan pondok ngaliyan asri dalam memaknai fenomena calon tunggal yang terjadi pada pilkada serentak di Kota Semarang tahun 2020 terdapat dua sikap masyarakat kelas menengah yakni sikap pro atau mendukung dan tidak mempermasalahkan adanya calon tunggal, dan yang kedua adalah sikap kontra yakni menolak keras adanya calon tunggal yang terjadi pada pilkada di Kota Semarang pada tahun 2020.

## **B. Saran**

Sesuai pelaksanaan hasil serta proses penelitian, berikut beberapa penyampaian saran peneliti sebagai dasar bagi pemilik kepentingan:

1. Menambahkan pasal tentang pembatasan total kursi bagi partai politik saat mengundangkan pasangan calon sebab peraturan tersebut belum tersedia maka besar peluangnya satu pasangan calon didukung seluruh partai politik.
2. Fungsi parpol dalam rekrutmen dalam politik diperkuat parpol sendiri. Seharusnya parpol mengerjakan penjangkaran atau pendaftaran secara transparan kapabel serta objektif untuk calon pasangan agar menarik masyarakat dalam pemilihan juga memperoleh praktik politik transaksional pasangan calon serta tercapailah kesempurnaan kehidupan demokrasi nantinya. .
3. Pelaksanaan sosialisasi intensif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada seluruh masyarakat dengan memberikan pemahaman fenomena calon tunggal serta kotak kosong jadi bukan meningkatkan partisipasi masyarakat. Diperlukan agar multitafsir tak terjadi di kalangan masyarakat bahwa hak pilihnya tak diberikan atau satu pilihan diberikan ke masyarakat jadinya tingkat partisipasi menurun akan pengerjaan pilkada serentak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agam, F. (2020). Isu Identitas Agama dan Sikap Politik Masyarakat Kota Palembang Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. *repository Raden Fatah*.
- Alsa, A. (2014). *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Alwasilah, A. C. (2011). *Pokoknya Kualitatif : Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Amalia, D. (2014). Peran Koperasi Wanita dalam Pemberdayaan Perempuan Pekerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Sosiologi Universitas Brawijaya*.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anggraini, V. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020). *e-Repository Perpustakaan IAIN Bengkulu*.
- Angin, R. A. (2017). Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2017 (Studi Kasus: Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal di Kota Tebing Tinggi 2017). 15.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Dahl, R. A. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dewi, S. M. (2015). Sikap dan Pemaknaan Perempuan Marginal Terhadap Politik Uang: Studi Kasus Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Kudus. *Repository IAIN Kudus*.

- Firdaus, S. (2013). Paradigma Rational Choice dalam Menelaah Fenomena Golput dan Perilaku Pemilih di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 173.
- Frankael, J., Wallen, N., & Hyun, H. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill.
- Gaffar, A. (2001). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, P. (2019). Pemaknaan Tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne Terhadap Perubahan Politik Mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang. *Repository UIN Raden Fatah*.
- Jonathan, P. (2017). Pemaknaan Ahok Sebagai Tokoh Politik Melalui Meme di Media Sosial dalam Membentuk Opini Pemilih Pertama Pada Pilgub DKI 2017. *repository UPH*.
- Kansil, C. (1986). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. 47.
- Lester Walter Milbrath; M.L. Goel. (1977). *Political Participation*. Chicago: Rand McNally College Publishing Co.
- Mamonto, K. S., & Setiyono, J. (2021). Demokratisasi Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Journal Trunojoyo*.
- Na'imah, Z. (2019). Praktik Politik Uang dan Pemaknaannya Oleh Kelas Menengah dalam Pilkada 2017: Studi Kasus di Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. *eprints Walisongo*.
- Newman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Ober, J. (2007, September). The original meaning of "democracy": Capacity to do things, not majority rule.

- Putro, M. R. (2018). Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tahun 2017 (Studi Terhadap Pelaksanaan dan Tingkat Partisipasi Pemilih di Daerah Jayapura dan Tebing Tinggi. *Jurnal UII*.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. 12.
- Rahmanto, T. Y. (2018). Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten. *Jurnal HAM*.
- Raqhuel Dominique Ning; Tedi Ervianto; Muhammad Ali Azhar. (2016). Strategi Incumbent Parpol Mempertahankan Suara Pasca Pindah Partai Pada Pemilu Legislatif Kota Denpasar Tahun 2014. *Jurnal Unud*, 4.
- Riyanto, A. (2021). Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak di Jawa Tengah. *SPEKTRUM*, 3.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, A., Muliando, B., Fikri, R., & Selwa, H. (2021). Pemuda dalam Kontestasi Politik: Melacak Alasan Rasional Calon Anggota Legislatif Muda DPRD Kota Pekanbaru di Pemilihan Legislatif Tahun 2019. *Jurnal Niara*, 202.
- Adrain, C. F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana .
- Boudon, R. (2009). Rational Choice Theory, *The New Blackwell Companion to Social Theory*. 179.

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Coleman, J. S. (2008). *Dasar-Dasar Teori Sosial Foundations of Social Theory*. Bandung: Nusa Media.
- Dahl, R. A. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Press.
- Damsar. (2011). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Diah Astanti; Moh. Mudzakir. (2016). Rasionalitas Politik Pemilih Pemula di Tegalsari Surabaya. 7.
- Efriza. (2012). *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Elly M. Setiadi; Usman Kolip. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Firdaus, S. (2013). Paradigma Rational Choice dalam Menelaah Fenomena Golput dan Perilaku Pemilih di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 173.
- Hamidi, J. (2010). Rethinking Penyelenggaraan Pilkada Yang Demokratis dan Partisipatif, dalam Konstitusionalisme Demokrasi (sebuah diskursus tentang pemilu, otonomi daerah dan mahkamah konstitusi sebagai kado untuk "sang penggembala" Prof. A. Mukhtie Fadjar. *In Trans Publishing*, 217.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Karim, S. (2017). *Politik Islam*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Maran, R. R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Ningsih, D. W. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal. 47.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM.
- RS, I. R. (2016). Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 7-8.
- Solikhin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 169-170.
- Supriyono, A. (2014). Mendongkrak Partisipasi Pemilu di Indonesia. *Perludem*.
- Supriyono, A. (2014). Mendongkrak Partisipasi Pemilu di Indonesia. *Perludem*, 39.
- Supriyono, A. (2014). Mendongkrak Partisipasi Pemilu di Indonesia. *Pemilda*, 47.

- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Taha, I. (2004). *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Wiratmaja, I. N. (2018). Dilema Demokrasi Elektoral. *Jurnal Bappeda Litbang* , 77.
- Witteck, R. (2016). "Rational Choice Theory", dalam *Warms, Richard L&McGee, R.Jon. (2013) Theory in Social and Cultural Antrophology*. London: Sage Publications.
- Adrain, C. F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* . Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana .
- Boudon, R. (2009). Rational Choice Theory, *The New Blackwell Companion to Social Theory*. 179.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Coleman, J. S. (2008). *Dasar-Dasar Teori Sosial Foundations of Social Theory*. Bandung: Nusa Media.
- Dahl, R. A. (1985). *Dilema DemokrasI Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Press.
- Damsar. (2011). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Diah Astanti; Moh. Mudzakir. (2016). Rasionalitas Politik Pemilih Pemula di Tegalsari Surabaya. 7.
- Elly M. Setiadi; Usman Kolip. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, F. R. (2018). Landasan Program Perencanaan&Perancangan Arsitektur (LP3A) Apartemen High-Rise di Semarang. 42.
- Firdaus, S. (2013). Paradigma Rational Choice dalam Menelaah Fenomena Golput dan Perilaku Pemilih di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 173.
- Hamidi, J. (2010). Rethinking Penyelenggaraan Pilkada Yang Demokratis dan Partisipatif, dalam *Konstitusionalisme Demokrasi (sebuah diskursus*

tentang pemilu, otonomi daerah dan mahkamah konstitusi sebagai kado untuk "sang penggembala" Prof. A. Mukhtie Fadjar. *In Trans Publishing*, 217.

- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Karim, S. (2017). *Politik Islam*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Maran, R. R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Nasikun. (1984). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Ningsih, D. W. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal. 47.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM.
- RS, I. R. (2016). Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 7-8.
- Solikhin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 169-170.
- Stastika Ketahanan Sosial Kota Semarang 2016. (2017). *Badan Pusat Statistik Kota Semarang*, 53.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Taha, I. (2004). *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Wiratmaja, I. N. (2018). Dilema Demokrasi Elektoral. *Jurnal Bappeda Litbang* , 77.
- Witteck, R. (2016). "*Rational Choice Theory*", dalam *Warms, Richard L&McGee, R.Jon. (2013) Theory in Social and Cultural Antrophology*. London: Sage Publications.
- Febriana Andiani Putri; Raihan Dwipriandi. (2021). Efektivitas Virtual Campaign Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 111.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hamad, I. (2004). *Konstruks Realitas Politik Dalam Media Massa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Iptek, D. (2016). *Indikator Keluarga Sejahtera*.
- Joni Hermanto; Annisa Purwatiningsih; Muhamad Rifa'i. (2020). Pengaruh Isu, Figur, Rekam Jejak dan Partai Politik Terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Presiden (PILPRES) Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 32.
- Maulana, R. (2016). Marketing Politik Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Karawang. *Jurnal Politik Indonesia*, 109.
- Robinson; Goodman. (1996). *The New Rich in Asia: Mobile Phones, McDonalds and Middle-class Revolution*. London and New York: Routledg.
- Sahdan, G. (2008). *Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy.
- Savran Billahi; Idris Thaha. (2018). *Bangkitnya Kelas Menengah Santri Modernisasi Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Waty, R. R. (2019). Gerakan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Studi atas Konsolidasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca Perppu No.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. 26.
- Yuniarti, T. (2010). Strategi Media Relations Tim Sukses Calon Presiden Wakil Presiden Melalui Media Surat Kabar Daerah. *Jurnal Makna*, 16.
- Yunus, M. R. (2019). STRATEGI KOMUNIKASI TIM SUKSES PDI-PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN PILKADA BIAK NUMFOR 2018. *"Gema Kampus" IISIP YAPIS*, 14, 17-24.
- Heryanto. (1999). *Kelas Menengah yang Majemuk dalaam buku Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya .
- Savran Billahi; Idris Thaha. (2018). *Bangkitnya Kelas Menengah Santri Modernisasi Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.

## LAMPIRAN



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan informan Ibu Novi Maria Ulfa Komisaris KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, 12 April 2022



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan informan Bapak Untung Ketua Tim Pelaksana DPC PDIP Kota Semarang, 24 April 2022



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan informan Bapak Ridho Kepala Divisi Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Semarang, 29 Juni 2022

Foto bersama dengan masyarakat kelas menengah



## **CURRICULUM VITAE**



Nama : Ratnasari Peri  
NIM : 1806016011  
TTL : Jakarta, 24 November 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh Zamrud Blok M2/28  
RT 03 RW 14, Kota Bekasi  
HP : 081282779924  
Email : [periratna19@gmail.com](mailto:periratna19@gmail.com)

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. TK Pertiwi
2. SD Negeri Padurenan VI Kota Bekasi
3. SMP Negeri 26 Kota Bekasi
4. SMA Daya Utama Kota Bekasi
5. S-1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

### **RIWAYAT ORGANISASI**

1. Satoe Atap Semarang
2. Easy English Club (EEC) Semarang